

**PANDANGAN DAN HARAPAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP WACANA PEMEKARAN KABUPATEN BONE
(BONE BAGIAN SELATAN)**

Skripsi

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1**

Program Studi Ilmu Pemerintahan



UNIVERSITAS HASANUDDIN	
No. Pendaftaran	25 - 2 - 09
Nama	Sasrul
Alamat	Indis
Tempat	Indis
Tgl. Lahir	19

Oleh

**INDRA AVIDIANTO M
E 121 04 001**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

LEMBARAN PENGESAHAN**Skripsi****PANDANGAN DAN HARAPAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP WACANA PEMEKARAN KABUPATEN BONE
(BONE BAGIAN SELATAN)**

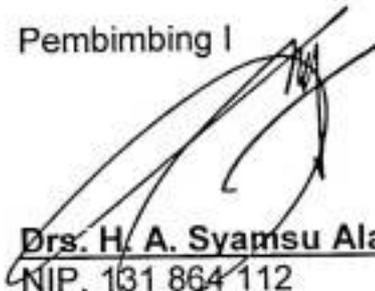
yang dipersiapkan dan disusun oleh
Indra Avidianto M
- E121 04 001

telah dipertahankan di depan panitia ujian skripsi
pada tanggal 15 Januari 2009
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

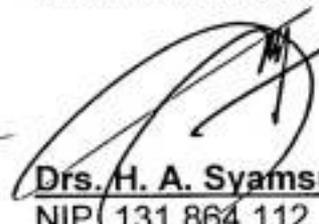

Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP. 131 864 112


Dr. A. M. Rusli, M. Si
NIP. 131 961 974

Menyetujui :


**Ketua Jurusan Ilmu Politik
dan Ilmu Pemerintahan**
Dr. Armin Arsyad, M. Si
NIP. 131-961-985

**Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**


Dr. H. A. Syamsu Alam, M.Si
NIP. 131 864 112

LEMBARAN PENERIMAAN**Skripsi****PANDANGAN DAN HARAPAN TOKOH MASYARAKAT
TERHADAP WACANA PEMEKARAN KABUPATEN BONE
(BONE BAGIAN SELATAN)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh
Indra Avidianto M
E121 04 001

telah diperbaiki
dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi
pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Makassar, pada hari Kamis, 15 Januari 2009

Menyetujui:

Panitia Ujian

Ketua : Dr. Hasrat Arief Saleh, MS

Sekretaris : A. Lukman Irwan, S.Ip

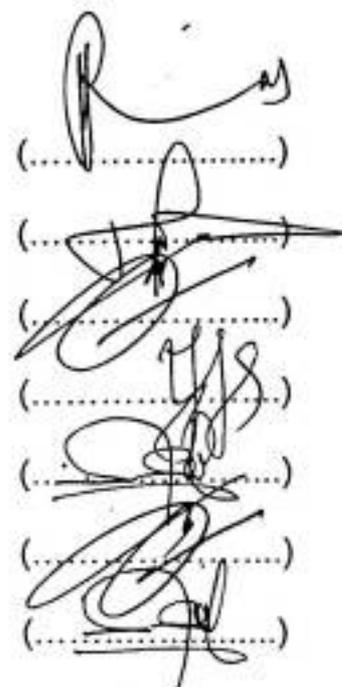
Anggota : Drs. H. Andi Syamsu Alam, M.Si

Anggota : H. Suhardiman Syamsu, S.Sos, M.Si

Anggota : Drs. A. M. Rusli, M.Si

Pembimbing I : Drs. H. Andi Syamsu Alam, M.Si

Pembimbing II : Drs. A. M. Rusli, M.Si



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh"

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayahNya, sehingga skripsi yang berjudul **"Pandangan Dan Harapan Tokoh Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone (Bone Bagian Selatan)"** ini, dapat penulis selesaikan.

Penulis sangatlah menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi teknik penulisan maupun dari segi isinya. Untuk itu, penulis menerima segala bentuk usul, saran ataupun kritikan yang sifatnya membangun demi penyempurnaan berikutnya.

Pada kesempatan yang baik ini pula, penulis tak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Machmuddin, SE., dan ibunda Fatmawati D, Spd.Sd yang telah mencurahkan seluruh cinta, kasih sayang, cucuran keringat dan air mata, untaian doa serta pengorbanan tiada henti, yang hingga kapanpun penulis takkan bisa membalasnya. Maafkan jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan ibunda dan ayahanda.

Keselamatan Dunia Akhirat semoga selalu untukmu. Semoga Allah selalu menyapamu dengan Cinta-Nya.

2. Saudara - saudaraku Indriani Machwana Spd., Try Alfian Machwana dan Faradilla Pratiwi Machwana yang telah mencurahkan kasih sayang, dorongan moril dan materi, serta senantiasa menemani penulis dalam duka, canda dan tawa.
3. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, Sp. BO. FICS, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di kampus terbesar di Indonesia Timur ini, Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Deddy T. Tikson, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta seluruh stafnya.
5. Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS beserta seluruh stafnya.
6. Bapak Drs. H. Andi Syamsu Alam, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan FISIP UNHAS sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Drs. A. M. Rusli, M. Si. selaku Pembimbing II yang telah mendorong, membantu, dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.

8. Pemerintah Daerah Bone, Khususnya Camat Bone bagian selatan (Tonra, Kajuara, Kahu dan Patimpeng) beserta kepala-kepala seksi, staf dan seluruh pegawai kantor Kecamatan atas segala bantuan yang diberikan selama penelitian.
9. Keluarga H. Rasyidin Suaib, SE., keluarga H. Aminuddin, keluarga Drs. H. Anwar Denu, keluarga Sabaruddin, S.Sos., keluarga Aksan Nusa SH. Semoga ini dapat menjadi kebanggaan dan contoh bagi adik-adik sepupu dan terimakasih kalian telah percaya kepada saya.
10. Pa' Imran , S.IP, M.Si., selaku dosen, guru, dan orang tua penulis, yang telah banyak membantu, membimbing serta mendorong penulis untuk terus belajar, berkarya dan berprestasi.
11. Segenap keluarga Kecil Mahasiswa Ilmu Pemerintahan 2004, **Kybernology '04**. Kebersamaanmu akan menjadi sejarah yang takkan lekang oleh zaman dan takkan pudar oleh waktu.
12. Seluruh rekan-rekan seperjuanganku di Persatuan Mahasiswa Bone Universitas Hasanuddin LATENRITATTA (PMB-UH LATENRITATTA), atas canda tawa yang selalu mewarnai hari-hari bersama kita semua dan telah memberikan banyak pelajaran banyak hal.
13. Teman-teman dan saudara-saudaraku dalam komunitas kecil IM-NEBO atas canda tawa yang selalu mewarnai hari-hari bersama kita semua.

14. K' Icoel, Sofyan, Ichal, Accoel, Andi, Wawan dan Laredo. Kenangan yang telah kita lewati bersama akan penulis jadikan sebagai pelajaran untuk hari depan.
15. Seluruh keluarga, rekan, sahabat dan handai taulan yang kesemuanya tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian studi penulis.

Selain itu, penulis juga mengucapkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya jika penulis telah banyak melakukan kesalahan dan kekhilafan, baik dalam bentuk ucapan maupun tingkah laku, semenjak penulis menginjakkan kaki pertama kali di Universitas Hasanuddin hingga selesainya studi penulis. Semua itu adalah murni dari penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan. Adapun mengenai kebaikan-kebaikan penulis, itu semata-mata datangnya dari Allah SWT, karena segala kesempurnaan hanyalah milik-Nya.

Akhirnya, penulis berharap bahwa apa yang disajikan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kesemuanya ini dapat bernilai ibadah di sisi-Nya, Amin!

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, Januari 2009

Penulis

ABSTRAKSI

INDRA AVIDIANTO M. NIM E 121 04 001. Pandangan dan Harapan Tokoh Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone (Bone Bagian Selatan), di bawah bimbingan Drs. H. Andi Syamsu Alam, M.Si dan Drs. A. M. Rusli, M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan harapan tokoh masyarakat Bone bagian selatan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Bone.

Tipe penelitian ini menggunakan dasar penelitian survey dan tipe penelitian deskriptif. Hal ini dimaksudkan guna memperoleh gambaran yang jelas mengenai pandangan dan harapan tokoh masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Bone (bone bagian selatan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi atau pengamatan langsung, angket, serta wawancara terhadap sejumlah informan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pada umumnya tokoh masyarakat mengetahui rencana pembentukan Kabupaten Bone.
2. Tokoh masyarakat sangat menaruh harapan besar terhadap upaya pembentukan daerah Kabupaten Bone Selatan, karena dengan terbentuknya kabupaten baru ini kelak, akan menciptakan peluang lapangan pekerjaan yang besar, mereka juga berharap agar pemerintah lebih mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih memperhatikan nasib mereka, pelayanan dapat dinikmati dengan mudah, bebas KKN, pembangunan yang merata, potensi daerah dapat dikelola dengan baik dan masa depan yang layak bagi keturunan mereka akan terbuka lebar.
3. Tingkat persetujuan masyarakat yang tinggi, tidak terlepas dari tanggapan/pemahaman akan manfaat sebuah pemberian hak otonomi kepada sebuah daerah, karena menurut mereka dengan terbentuknya kabupaten ini, akan membawa manfaat antara lain:
 - a. Efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan segala urusan yang berhubungan dengan pemerintah akan tercipta.
 - b. Pelayanan akan semakin cepat, murah dan berkualitas.
 - c. Pembangunan akan lebih merata ke seluruh daerah.
 - d. Akan terjalin kedekatan antara pemerintah dan masyarakat yang pada gilirannya akan menciptakan sebuah iklim kerjasama yang baik dalam menciptakan kesejahteraan bersama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENERIMAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1. Tujuan Penelitian	6
1.3.2. Kegunaan Penelitian	7
1.4. Kerangka Konseptual.....	7
1.5. Metodologi Penelitian	10
1.5.1. Lokasi Penelitian	10
1.5.2. Dasar dan Tipe Penelitian.....	10
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data	11
1.5.4. Populasi dan Sampel	12
1.5.5. Jenis dan Sumber Data	13
1.5.6. Defenisi Operasional	14
1.5.7. Analisis Data.....	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Pengertian Pandangan dan Harapan.....	16

2.2. Konsep Masyarakat	18
2.3. Konsep Pemekaran.....	24
BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
3.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone	32
3.2. Kondisi Geografis Bone Selatan	39
3.3. Pemerintahan Bone Selatan	43
3.4. Penduduk Bone Selatan.....	45
3.5. Keadaan Sosial.....	48
3.5.1. Pendidikan (<i>Education</i>).....	48
3.5.2. Kesehatan (<i>Health</i>).....	50
3.6. Potensi Daerah Terhadap Investor.....	52
3.6.1. Pertanian.....	52
3.6.2. Perindustrian.....	53
3.6.3. Pertambangan dan Energi.....	53
3.6.4. Perkebunan dan Kehutanan.....	54
3.6.5. Perikanan.....	56
3.6.6. Peternakan.....	57
3.6.7. Pariwisata.....	58
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Karakteristik Responden.....	59
4.1.1. Usia Responden.....	59
4.1.2. Jenis Kelamin.....	60
4.1.3. Pendidikan Terakhir	61
4.1.4. Pekerjaan Responden	63
4.2. Pandangan Tokoh Masyarakat Bone Bagian Selatan Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone.....	64
4.2.1. Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pemerintah	

4.2.2. Pengetahuan Masyarakat tentang Istilah Pemekaran ...	69
4.2.3. Pengetahuan Tokoh Masyarakat tentang Pemekaran Bone Selatan	71
4.3. Harapan Tokoh Masyarakat Akan Terbentuknya Bone Selatan..	
4.3.1. Pengamatan Tokoh Masyarakat Akan Terbentuknya Bone Selatan	75
4.3.2. Alasan Tokoh Masyarakat Akan Rencana Pemekaran Bone Selatan.....	83
4.4. Beberapa Peluang Konflik Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Bone Selatan.	88
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	92
5.2. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.	Tabel 3.1.1	Sejarah Singkat Pemerintahan Bone dan Daftar Susunan Raja-Raja Bone	36
2.	Tabel 3.1.2	Nama-Nama Pimpinan Yang Memerintah Daerah Bone Secara Berurutan	37
3.	Tabel 3.2.1	Luas Wilayah Bone Selatan.....	40
4.	Tabel 3.2.2	Jarak Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan Bone Selatan	41
5.	Tabel 3.2.3	Luas Wilayah Bone Selatan Menurut Ketinggian	42
6.	Tabel 3.2.4	Luas Wilayah Tanah Usaha Tiap Kecamatan di Wilayah Bone Selatan.....	42
7.	Tabel 3.2.5	Keadaan Jenis Tanah di Wilayah Bone Selatan	43
8.	Tabel 3.3.1	Pembagian Wilayah Administrasi Bone Selatan	44
9.	Tabel 3.3.2	Nama Ibukota Kecamatan Dan Banyaknya Desa/Kelurahan Bone Selatan.....	44
10.	Tabel 3.4.1	Penduduk Bone Selatan Dirinci Menurut Kecamatan..	47
11.	Tabel 3.4.2	Penduduk Bone Selatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin	47
12.	Tabel 3.5.1	Banyaknya Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi	49
13.	Tabel 3.5.2	Banyaknya Guru dan Murid di Bone Selatan	49
14.	Tabel 3.5.3	Banyaknya puskesmas dan posyandu di bone selatan	51
15.	Tabel 3.5.4	Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Agama dan Pemuka Agama Islam di Bone Selatan	51
16.	Tabel 4.1.1	Distribusi Responden Menurut Usia	59
17.	Tabel 4.1.2	Distribusi responden menurut jenis kelamin	60



18.	Tabel 4.1.3.1	Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan	62
19	Tabel 4.1.3.2	Nilai dan Skor Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan di Wilayah Bone Bagian Selatan dan Kabupaten Bone	63
20.	Tabel 4.1.4	Distribusi Responden Menurut Pekerjaan	64
21.	Tabel 4.2.1.1	Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan	65
21.	Tabel 4.2.1.2	Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Pelayanan Pemerintah Kecamatan	66
22.	Tabel 4.2.1.3	Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Kondisi Keamanan Selama Ini	68
23.	Tabel 4.2.2.	Sumber Pengetahuan Responden Terhadap Istilah Pemekaran	70
24.	Tabel 4.3.1.1	Tanggapan Responden Akan Pelayanan Jika Bone Selatan Terbentuk	76
25.	Tabel 4.3.1.2	Tanggapan Responden Akan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jika Bone Selatan Terbentuk	77
28.	Tabel 4.3.1.3	Tanggapan Responden Akan Tingkat Pendapatan Masyarakat Jika Bone Selatan Terbentuk	78
29.	Tabel 4.3.1.4	Tanggapan Masyarakat tentang Potensi Daerah Yang Dapat Dikembangkan	81
30.	Tabel 4.3.1.5	Tanggapan Responden Akan Kultur Budaya Yang Ada	82
31	Tabel 4.3.2	Tanggapan Responden Akan Terbentuknya Bone Selatan	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu perubahan yang mendasari dalam era Reformasi saat ini adalah pemberian otonomi daerah yang lebih luas. Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya. Oleh karena itu daerah diberi kebebasan dan keleluasaan untuk membangun dan mengembangkan daerah sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya.

Otonomi daerah yang lebih luas membawa dampak terhadap perubahan dan pengembangan suatu wilayah. Salah satunya adalah dengan adanya respon pemerintah pusat terhadap pemekaran wilayah melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini tentu memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk melakukan pemekaran wilayah sebagai penjabaran undang-undang tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, diterbitkanlah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yang merupakan hasil revisi dari PP No. 129 Tahun 2000. Munculnya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 telah memicu berbagai daerah untuk melakukan

pemekaran wilayah yang salah satunya adalah pemekaran wilayah Kabupaten Bone Propinsi Sulawesi Selatan.

Antropolog Elisabeth Morrel (Tasrifin Tahara, *Tribun Timur* 15 Maret 2007) mengatakan seperti halnya masyarakat Sulawesi Selatan, tuntutan terbentuknya propinsi dan kabupaten baru menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat dengan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistis dan mengabaikan masyarakat yang jauh dari pusat pemerintahan. Masyarakat di daerah diabaikan karena jarak yang jauh secara geografis dari pusat pemerintahan sehingga pelayanan masyarakat juga semakin sulit. Sulitnya pelayanan mendorong daerah tertentu untuk melakukan pemekaran wilayah yang berpisah dari kabupaten induknya.

Demi menghindari adanya ketimpangan yang terjadi di daerah yang telah dimekarkan, maka langkah pertama yang mesti dilakukan adalah distribusi sumber daya yang menyangkut aparat pemerintahan, kemudian dana alokasi pembangunan yang didasarkan pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Sumber daya manusia yang menjadi motor pembangunan adalah keharusan karena sebaik apapun sebuah rencana dan strategi yang disusun dan dibuat, akan menjadi mentah dan buyar akibat ketiadaan mental pembangunan yang melekat pada dirinya. Jika demikian yang terjadi maka, isu pemekaran daerah yang dilemparkan atas nama masyarakat hanyalah

merupakan sarana untuk membagi kursi pemerintahan. Dimana dengan begitu akan membuka akses yang luas pada berbagai posisi-posisi penting, penerimaan pegawai yang banyak untuk menduduki pos tertentu yang hanya menambah beban negara.

Akan sangat disayangkan, jika ternyata cita-cita pemekaran daerah dilakukan seperti disebut di atas. Untuk itu, kita hanya dapat berharap bahwa pemekaran daerah dapat menjadi lampu hijau dalam pembangunan masa depan daerah yang lebih baik. Tidak saja dalam pembangunan fisik (industri) maka daerah dapat dinyatakan maju, tetapi cara berpikir masyarakat, pola hidup masyarakat dimana mereka tak dirundung lagi oleh budaya tradisional dengan sikap tradisional, tetapi telah beralih ke warisan budaya tradisi dengan sikap yang tak tradisional. Pembangunan seperti ini akan jauh lebih bermanfaat, jika dibandingkan dengan pembangunan dengan konsentrasi industri yang lebih menciptakan budaya ketergantungan.

Kabupaten Bone adalah salah satu dari sekian banyak kabupaten yang ingin mencoba melakukan pemekaran seperti kabupaten lain yang ada di wilayah Indonesia. Adapun daerah ini rencana dimekarkan menjadi empat wilayah yaitu Bone, Bone Barat, Bone Utara, dan Bone Selatan yang tak lain dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik akibat jarak wilayah ibukota kabupaten dengan daerah ini cukup jauh. Rencana pemekaran ini dengan alasan utama seperti disebut di atas, tentunya bertujuan



meningkatkan kesejahteraan rakyat, perluasan ruang bagi pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa lebih dinikmati masyarakat di daerah tersebut.

Namun rencana tersebut sudah sejak awal mengalami pro kontra dikalangan masyarakat bahkan sudah mengarah pada konflik elit, ini dibuktikan pada hasil penelitian yang ada sebelumnya. Bagi penulis pro kontra maupun konflik yang ada kemungkinan terjadi salah satunya akibat tidak adanya penelitian sebelumnya yang memadai tentang pengetahuan ataupun aspirasi masyarakat sesungguhnya yang bisa menjadi pegangan semua pihak yang pro maupun yang kontra. Sebab yang menjadi permasalahan saat ini adalah apakah rencana ini murni muncul dari aspirasi masyarakat di Kabupaten Bone khususnya Bone bagian selatan atau hanya dihembuskan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu saja. Hal inilah yang mencoba diketahui lewat penelitian ini, diharapkan bahwa dari penelitian kami dapat menggali sejauh mana pandangan serta aspirasi masyarakat tentang rencana pemekaran, apakah benar bahwa keinginan tersebut adalah murni keinginan masyarakat atau hanya keinginan sekelompok elit saja?

Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“Pandangan Dan Harapan Tokoh Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone (Bone Bagian Selatan)”

1.2. Rumusan Masalah

Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, telah disebutkan dengan jelas sejumlah kualifikasi yang menjadi persyaratan pembentukan suatu daerah otonom. Pasal 4 ayat (2) PP ini menyebutkan bahwa:

“Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.”

Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) tentang syarat administratif bahwa, “Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat.”

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a yang dimaksud di atas masing-masing, adalah; “Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon provinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna”, dan “Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota”.

Secara sederhana jika berbicara mengenai aspirasi, akan berawal pada pembahasan mengenai pandangan/tanggapan seseorang terhadap stimulus yang ada, yang kemudian diproses dan menghasilkan buah pemikiran yang kemudian lazim disebut sebagai persepsi. Dalam hal rencana pembentukan Kabupaten Bone Selatan, tentunya juga tidak akan terlepas dari pandangan beragam masyarakat, baik yang sifatnya pro maupun kontra. Hal ini pulalah yang kemudian akan membentuk tatanan sosial, utamanya kesiapan mental dari masyarakat dalam menyikapi dan menyambut kehadiran peluang baru bagi kehidupan yang sejahtera.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka masalah yang akan diteliti dibatasi dalam rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Bone bagian selatan terhadap wacana pemekaran Kabupaten Bone?
2. Apa harapan tokoh masyarakat setelah Bone selatan terbentuk nantinya ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pandangan masyarakat Bone bagian selatan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Bone.

2. Untuk mengetahui harapan tokoh masyarakat setelah terbentuk Bone selatan nantinya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemekaran Kabupaten Bone.
2. Sekiranya dapat digunakan oleh daerah sebagai referensi dalam upaya mengkaji lebih jauh fenomena pemekaran wilayah di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Bone.
3. Kegunaan akademik dari hasil ini diharapkan memberikan nilai tambah bagi penelitian-penelitian ilmiah, selanjutnya dapat dijadikan bahan komparatif bagi yang mengkaji masalah Otonomi Daerah terutama tentang masalah pemekaran.

1.4. Kerangka Konseptual

Wacana tentang pemekaran kabupaten Bone bukanlah hal baru lagi, gagasan ini setidaknya dibuktikan dengan diwujudkannya deklarasi di dua tempat yaitu Palattae pada tanggal 26 Januari 2003, dimana wilayah ini merupakan representasi dari keinginan pembentukan wilayah Bone selatan. Sedangkan deklarasi yang kedua sebagai representasi dari keinginan masyarakat Bone bagian barat yang berlangsung di Lappa Riaja pada 9 september 2003.

Wilayah yang menjadi rencana pemekaran Bone Selatan yang terdiri dari tujuh kecamatan menjadi tempat bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dimana penulis mencoba menggali tentang "Pandangan Dan Harapan Tokoh Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone (Bone Bagian Selatan)".

Selanjutnya penulis mencoba mengemukakan defenisi/ pengertian tentang apa itu pandangan dan harapan?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan disebut "sesuatu yang dipandang" (dalam arti kiasan juga). "Penglihatan yang tetap dan agak lama, memandang, melihat, menganggap, memperlakukan sebagai, memperdulikan, memperlihatkan, mengingat akan, menyegani, menghargai, pemandangan, penglihatan, keadaan alam mengenai sesuatu hal dalam rapat" (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007:641).

Sedangkan harapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "sesuatu yang (dapat) diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau dipercaya". Harap berarti "mohon, minta, hendaklah, keinginan supaya sesuatu terjadi". Harap-harap berarti "gelisah, khawatir, bimbang". Harap-harapan berarti "selalu berharap, selalu rindu (akan), selalu menanti". Berharap berarti "berkeinginan supaya terjadi, meminta supaya" (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007:311).

Bagan Kerangka Konseptual

Pemerintah Kabupaten Bone
UU 32 Tahun 2004



Rencana Pemekaran
Bone Bagian Selatan
PP No. 78 Tahun 2007



PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT

- Pelaksanaan Pemerintahan
- Pengetahuan Tentang Istilah Pemekaran
- Pengetahuan Pemekaran Bone Selatan
- Pengamatan Terhadap Terbentuknya Bone Selatan
- Alasan Rencana Pemekaran Bone Selatan
- Peluang Terjadinya Konflik

1.5. Metode Penelitian

Dalam pembahasan metode penelitian ini akan diuraikan menyangkut 7 aspek pendukung dalam metodologi penelitian yang akan dilakukan. Adapun 7 aspek tersebut, yaitu: lokasi penelitian, dasar dan tipe penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, definisi operasional, dan teknik analisis data yang kesemuanya akan diuraikan lebih lanjut.

1.5.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa wilayah di Kabupaten Bone bagian selatan yang terdiri dari empat kecamatan yakni: Kecamatan Tonra, Kajuara, Kahu, dan Patimpeng. Yang rencananya akan dimekarkan menjadi sebuah kabupaten baru di daerah Bone.

1.5.2. Dasar dan Tipe Penelitian

- a. **Dasar penelitian** yang digunakan adalah *survey* yaitu merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif.
- b. **Tipe penelitian** yang digunakan adalah tipe penelitian *deskriptif*, yang bertujuan memberikan gambaran (deskripsi) secara jelas tentang kelayakan pemekaran sebuah daerah berdasarkan aturan yang ada.

1.5.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara Study Lapang (*field research*). Studi lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Studi lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

2. Interview

Yaitu mengadakan tanya jawab langsung kepada sejumlah informan dan responden untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Angket

Yaitu dengan mengedarkan daftar pertanyaan kepada sejumlah responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selain dengan studi lapang, penelitian ini juga akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara Studi Pustaka (*library research*), yaitu teknik pengambilan data dengan menelusuri literatur dan dokumen-dokumen atau perundangan-undangan yang relevan dengan fokus penelitian ini.

1.5.4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Bone bagian selatan yang terdiri dari tujuh kecamatan yakni: Kecamatan Tonra, Salomekko, Kajuara, Bonto Cani, Kahu, Patimpeng, dan Libureng. Dari ke tujuh kecamatan ini, penulis mengambil 4 sampel kecamatan, yaitu Kecamatan Tonra sebagai wilayah Bone bagian selatan yang jaraknya cukup dekat dengan ibukota Kabupaten Bone saat ini, Kajuara sebagai daerah yang letaknya berada pada wilayah perbatasan Bone-Sinjai, Kahu sebagai daerah yang letaknya cukup dekat dengan Kabupaten Sinjai, dan Patimpeng sebagai daerah yang wilayahnya berada di ujung Bone bagian selatan.

b. Sampel

Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel secara purposif (*purposive sampling*) yaitu memilih secara sengaja dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompeten terhadap masalah yang dihadapi dan diharapkan agar responden yang dipilih mewakili populasi. Adapun yang akan menjadi informan adalah beberapa tokoh-tokoh masyarakat, agamawan, budayawan, pendidik, pemuda, unsur pemerintah, kepala desa, dan Ormas lainnya yang ada di wilayah Bone Selatan.

Adapun responden yang dipilih berasal dari beberapa tokoh masyarakat, seperti:

- Agamawan	3 orang perkec. x 4 kec.	=	12 orang
- Budayawan	3 orang perkec. x 4 kec.	=	12 orang
- Pendidik	3 orang perkec. x 4 kec.	=	12 orang
- Pemuda	3 orang perkec. x 4 kec.	=	12 orang
- Petani	3 orang perkec. x 4 kec.	=	12 orang
			60 orang
		Jumlah	60 orang

1.5.5. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan ada dua jenis, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data-data kualitatif yang diperoleh langsung dari informan yang telah ditentukan, berupa catatan-catatan hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan sehingga dapat memberikan gambaran langsung tentang lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data relevan yang berasal dari buku-buku, literatur-literatur atau pengamatan langsung di lapangan yang dibutuhkan

sesuai dengan maksud penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran tentang kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan dengan pembentukan sebuah kabupaten.

1.5.6. Defenisi Operasional

Pembentukan sebuah daerah kabupaten baru merupakan pemberian tanggung jawab yang besar bagi masyarakat untuk turut serta dalam membangun daerahnya melalui partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Mengidentifikasi untuk memahami pandangan yang tersimpan dalam pengetahuan masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena pandangan yang melatarbelakangi perlakuan manusia dalam mencapai suatu keadaan yang dianggap baik.

Setelah menguraikan beberapa konsep dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan penelitian ini, maka untuk mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian perlu disusun defenisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini antara lain :

1. Tanggapan tokoh masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintahan

Bone bagian selatan dengan indikator antara lain :

- a. Pengetahuan pelaksanaan Pemerintahan.
- b. Pengetahuan tentang istilah pemekaran.

2. Tanggapan tokoh masyarakat Bone bagian selatan terhadap rencana pemekaran Kabupaten Bone, dengan indikator antara lain :
 - a. Pengetahuan tentang rencana pemekaran Bone selatan.
 - b. Pengamatan terhadap terbentuknya Bone selatan.
 - c. Alasan terhadap rencana pemekaran Bone selatan.
 - d. Peluang konflik terhadap rencana pemekaran Bone selatan.

1.5.7. Analisis Data

Untuk mendapatkan hasil yang obyektif dalam penelitian ini, maka data yang didapatkan di lapangan akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yang didukung oleh analisis kuantitatif dalam bentuk tabel frekuensi dan hasil wawancara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pandangan dan Harapan

Salah satu tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya keberadaan pemerintah di tengah-tengah kehidupan masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan demi terciptanya sebuah kehidupan yang sejahtera yang sesuai dengan cita-cita awal pembentukan sebuah sistem yang akan mengatur kehidupan masyarakat luas, yang kemudian disebut pemerintah. Senada dengan hal di atas, bahwa aspirasi masyarakat menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, yakni bagaimana proses pendistribusian aspirasi masyarakat menjadi perhatian utama yang tercermin dalam setiap kebijakan atau aturan yang di keluarkan oleh pemerintah.

Dalam memberikan aspirasinya, masyarakat tentunya berdasarkan pada pengetahuan yang dimilikinya. Selain itu, tanggapan tentang sebuah proses maupun produk kebijakan yang dikeluarkan dapat pula menjadi dasar pengetahuannya. Lebih jauh lagi, bahwa pandangan masyarakat merupakan sebuah bentuk partisipasi karena pandangan mengandung pemikiran, keinginan, yang didorong oleh hasrat murni, kehendak dan cita-cita manusia



dalam mencapai suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan sekaligus sebagai refleksi untuk berperilaku.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pandangan disebut "sesuatu yang dipandang" (dalam arti kiasan juga). "Penglihatan yang tetap dan agak lama, memandangi, melihat, mengangap, memperlakukan sebagai, memperdulikan, memperlihatkan, mengingat akan, menyegani, menghargai, pemandangan, penglihatan, keadaan alam mengenai sesuatu hal dalam rapat" (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007:641).

Sedangkan harapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti "sesuatu yang (dapat) diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan atau dipercaya". Harap berarti "mohon, minta, hendaklah, keinginan supaya sesuatu terjadi". Harap-harap berarti "gelisah, khawatir, bimbang". Harap-harapan berarti "selalu berharap, selalu rindu (akan), selalu menanti". Berharap berarti "berkeinginan supaya terjadi, meminta supaya" (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru, 2007:311).

Berdasarkan beberapa uraian di atas, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pandangan adalah sebuah hasil yang tercipta dari proses pemberian makna terhadap suatu stimulus (rangsangan) yang diterima oleh alat indera manusia. Untuk itu pandangan merupakan konsep yang di dalamnya terdapat subjek dan objek, baik berupa individu maupun berupa sebuah komunitas tertentu. Dalam proses pemberian makna dimaksud, objek dapat ditemukan melalui panca indera dalam suatu

interaksi sosial yang terjadi. Kemudian input tersebut akan diproses lebih lanjut dengan menggunakan informasi yang telah diterima sebelumnya sebagai bahan pembanding, yang dibuat dengan mempertimbangkan segala informasi/input yang memiliki relevansi dengan subjek yang menjadi fokus perhatian. Itulah kemudian yang menjadi sebuah konstruksi pemahaman dan pengetahuan di mana berbagai tanggapan yang dikemukakan subjek tersebut merupakan pandangan subjek itu.

2.2. Konsep Masyarakat

Kesatuan-kesatuan hidup manusia atau masyarakat yang dalam bahasa Inggris disebut "*society*" berasal dari bahasa latin "*socius*" yang berarti kawan. Kata masyarakat berasal dari bahasa Arab "*syara*" yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Menurut JL. Gillin dan JP. Gillin dalam Koentjaraningrat, (1981:144) menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup terbesar dimana terdapat kontinuitas adat istiadat, sikap dan identitas bersama dalam gerakannya. Lebih lanjut Koentjaraningrat (1981:146) menyatakan bahwa masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut satu sistem adat istiadat tertentu bersifat kontinyu dan terkait oleh suatu identitas bersama.

Pengertian ini mengandung makna bahwa dalam sebuah kelompok manusia yang telah bersepakat menyatukan diri menjadi sebuah komunitas yang disebut masyarakat, telah terdapat sebuah tatanan adat-istiadat yang mereka sepakati bersama yang sifatnya mengikat setiap individu yang ada

dalam kelompok tersebut. Adat inilah yang pada gilirannya akan menjadi sebuah tatanan sosial dan budaya, yang menjadi warna dan ciri khas tersendiri untuk masyarakat tersebut.

Terdapat empat unsur/ ciri dalam masyarakat yaitu :

1. Adanya interaksi antara warga-warganya.
2. Adanya adat, norma, hukum, dan aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku.
3. Suatu kontinuitas dalam waktu.
4. Suatu rasa identitas yang kuat yang mengikat semua warga.

Selain istilah masyarakat dijumpai pula istilah komunitas (community) atau masyarakat setempat berarti suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata dan berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas (Koentjaraningrat, 1981:148). Wilayah ini bisa berupa warga sebuah desa, kota, suku atau bangsa. Komunitas yang menunjukkan pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal disuatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas-batas tertentu sehingga faktor utama yang menjadi dasarnya adalah interaksi yang lebih besar diantara anggota dibandingkan dengan penduduk di luar batas wilayahnya.

Interaksi yang terjadi di dalam biasanya terdapat ikatan solidaritas yang kuat sebagai pengaruh kesatuan tempat tinggalnya yang juga berfungsi sebagai ukuran untuk menggaris bawahi hubungan antara hubungan-

hubungan sosial dengan suatu wilayah geografis. Di samping itu, ada perasaan saling memerlukan dan bahwa tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Perasaan demikian menurut Soekamto (1990:64) merupakan identifikasi dengan tempat tinggal yang dinamakan perasaan komuniti (*community centiment*) yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Seperasaan, akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasikan dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut.
2. Sepenanggungan, setiap individu sadar akan peranannya dalam kelompok dan keadaan masyarakat sendiri memungkinkan peranannya dalam kelompok dijalankan.
3. Saling memerlukan, individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun psikologis.

Kingsley Davis dalam Sardjono Soekamto (1990:165) mengemukakan bahwa masyarakat setempat dapat diklasifikasikan untuk membedakan antara bermacam-macam masyarakat yang sederhana/ tradisional dengan yang modern atau antara masyarakat pedesaan atau perkotaan. Klasifikasi itu menggunakan empat kriteria yang saling berkaitan, yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman, fungsi-fungsi khusus masyarakat setempat terhadap seluruh masyarakat, organisasi masyarakat setempat yang bersangkutan.

Masyarakat yang sederhana apabila dibandingkan dengan masyarakat yang sudah kompleks yaitu terlihat kecil, organisasinya sederhana dan penduduknya tersebar.

Lebih lanjut, Tonnies dan Loomis menguraikan bahwa interaksi dan hubungan di antara individu-individu selalu terjadi dalam masyarakat. Hubungan-hubungan positif antara manusia selalu bersifat "*gemeinschaft*" (paguyuban) atau "*gesellschaft*" (patembayan). Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasarnya adalah rasa cinta dan kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Paguyuban dapat terdiri karena ikatan yang didasarkan pada ikatan darah atau keturunan seperti keluarga dan kelompok kekerabatan, atau dapat pula karena tempat yang terdiri dari rukun tetangga, rukun warga dan arisan maupun karena jiwa pikiran mereka yang sama. Sebaliknya patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis. Patembayan terdapat dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik seperti antar pedagang, organisasi dan industri.

Hubungan-hubungan tersebut sangat mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat pedesaan (rural community) dan masyarakat perkotaan (urban community), walaupun perbedaan keduanya pada hakekatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang

lebih erat dan mendalam serta kelompok atas dasar sistem kekeluargaan dan umumnya hidup dari pertanian. Sedangkan bagi masyarakat perkotaan cirinya yang menonjol adalah :

1. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa.
2. Umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
3. Pembagian kerjanya juga lebih tegas dan punya batas-batas nyata sehingga kemungkinan untuk dapat pekerjaan juga lebih banyak.
4. Interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan kepada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
5. Perubahan-perubahan sosial tampak nyata di kota.

Selanjutnya menurut M. Cholil Mansyur (1989:21) memberikan pengertian masyarakat sebagai pergaulan hidup yang akrab antara manusia, dipersekutukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat-hasrat kemasyarakatan merdeka.

Dalam hidup bermasyarakat manusia selalu diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan aturan manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri begitu pun sebaliknya pada orang lain, saling ketergantungan ini menimbulkan interaksi sosial.

Interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat diketahui melalui adanya kontak sosial (social contact) dan komunikasi yang terjadi antara masyarakat. Adanya kontak sosial dan komunikasi itu sehingga masyarakat selalu kelihatan hidup penuh dengan kebersamaan.

Dari sejumlah definisi masyarakat tersebut di atas pada dasarnya mempunyai makna atau pengertian yang sama bahwa dalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa hal yang bersifat prinsipil, antara lain sebagai berikut :

- o Manusia yang hidup bersama. Dalam hal ini tidak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya adalah dua orang yang hidup bersama.
- o Bercampur dalam waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati yang lainnya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia-manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama ini, timbullah interaksi atau sistem komunikasi yang melahirkan konsekuensi logis berupa peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
- o Adanya kesadaran bahwa mereka adalah suatu kesatuan dimana antara anggota di dalamnya terdapat ikatan sosial.

- o Masyarakat adalah sebuah sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa masyarakat senantiasa merupakan suatu sistem, oleh karena mencakup berbagai komponen yang saling berkaitan secara sosial.

2.3. Konsep Pemekaran

Pemekaran wilayah yang terjadi di kabupaten dan kota di Indonesia merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang bersumber dari asas desentralisasi yang dianut oleh bangsa Indonesia tak lain dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, perluasan ruang bagi pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam agar bisa lebih dinikmati masyarakat di daerah tersebut.

Secara konseptual pengertian pemekaran wilayah dapat dirumuskan sebagai rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan nasional, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan daerah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam wadah NKRI.

Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang memberikan definisi tentang pembentukan dan pemekaran daerah, bahwa; "Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah propinsi atau daerah kabupaten/kota." Sedangkan "Pemekaran daerah adalah pemecahan propinsi atau kabupaten/kota menjadi dua daerah atau lebih."

Dari kedua pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan dan pemekaran daerah pada dasarnya adalah sama, yaitu lahirnya satu atau lebih daerah administratif dari satu daerah yang menjadi induknya. Perbedaannya hanya terletak pada sisi dari mana kita memandangnya. Istilah pemekaran daerah akan dipakai jika dilihat dari sisi daerah induk yang kemudian akan dipecah/dimekarkan menjadi beberapa daerah administratif, sedangkan istilah pembentukan daerah dapat dipakai jika melihat pada daerah baru hasil pemekaran tersebut.

Dalam UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, telah disebutkan dengan jelas sejumlah kualifikasi yang menjadi persyaratan pembentukan suatu daerah otonom. Pasal 4 ayat (2) PP ini menyebutkan bahwa:

"Pembentukan daerah kabupaten/kota berupa pemekaran kabupaten/kota dan penggabungan beberapa kecamatan yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan."

Lebih lanjut lagi disebutkan dalam Pasal 5 ayat (3) tentang syarat administratif bahwa, "Keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a diproses berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat."

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a yang dimaksud di atas masing-masing, adalah; "Keputusan masing-masing DPRD kabupaten/kota yang akan menjadi cakupan wilayah calon propinsi tentang persetujuan pembentukan calon provinsi berdasarkan hasil Rapat Paripurna", dan "Keputusan DPRD kabupaten/kota induk tentang persetujuan pembentukan calon kabupaten/kota".

Pemekaran wilayah merupakan wujud pengakuan politik kepada kelompok masyarakat tertentu, yang mempunyai bahasa dan budaya sendiri. Pengakuan pemerintah pusat kepada masyarakat tertentu dalam batas wilayah tertentu merupakan pemberian kesempatan kepadanya untuk menjaga, mengembangkan bahasa, budaya, nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat.

Pemberian otonomi daerah kepada daerah karena masih banyak masalah lokal yang jauh lebih baik kalau diatur dan diurus oleh masyarakat setempat. Hal itu sejalan dengan pemikiran *Hatta* yang menyatakan bahwa

masih banyak masalah lokal yang lebih efektif dan efisien kalau diurus dan diselesaikan sendiri oleh masyarakat setempat. Karena sesungguhnya yang paling mengetahui masalah lokal adalah masyarakat itu sendiri bukan Pemerintah Pusat. Karena itu sangat wajar kalau kepadanya diberikan otonomi untuk menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.

Pertumbuhan jumlah penduduk disertai dengan mahirnya kompleks kebutuhan-kebutuhan masyarakat dewasa ini telah banyak berpengaruh terhadap sistem dan kelembagaan pemerintah di Indonesia. Organisasi pemerintahpun telah banyak melakukan perluasan sistem pelayanan kepada masyarakat.

Pemekaran-pemekaran pada berbagai tingkatan pemerintah dewasa ini adalah suatu kebutuhan mendesak guna memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat. Walaupun tindakan pemekaran yang dilakukan tidak terlepas dari persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang.

Pembentukan suatu daerah otonom segera akan disertai dengan kewenangan atau urusan tertentu. Secara teoritis, 4 urusan pusat yang tidak dapat diserahkan kepada daerah, yakni urusan pertahanan keamanan, urusan diplomatik luar negeri, urusan peradilan dan urusan keuangan dalam arti mencetak uang. Hal itu karena urusan-urusan tersebut berkaitan dengan kedaulatan dan eksistensi suatu negara serta keberadaan pemerintah selaku penanggung jawab utama dan yang terakhir dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyat. Selain urusan-urusan tersebut

pada dasarnya urusan pemerintah pusat dapat didesentralisasikan kepada daerah.

Substansi pokok dalam penerapan politik desentralisasi adalah bagaimana mengatur pola distribusi urusan apa saja yang masih akan dilaksanakan sendiri oleh pusat dan urusan-urusan mana saja yang masih saja yang akan didesentralisasikan kepada daerah. Pengaturan tersebut akan selalu mengacu kepada pertimbangan historis, efisiensi, serta akuntabilitas penyelenggaraan urusan tersebut.

Atas dasar itu, terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembentukan suatu daerah otonom berkaitan dengan penyelenggaraan urusan.

Pertama, cakupan wilayah (*catchment area*) pelayan pemerintah daerah. Cakupan wilayah pelayanan pemda menjadi pertimbangan dalam pembentukan suatu daerah otonom karena pemerintah daerah dengan cakupan wilayah yang sempit atau terbatas akan menghadapi masalah efisiensi dalam penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dengan pertimbangan skala ekonomi (*economic scale*). Penyelenggaraan urusan-urusan tertentu seperti urusan transportasi, persampahan, telekomunikasi, listrik, telepon, gas, air minum, dan sebagainya membutuhkan cakupan wilayah yang luas agar mencapai *economic of scale* sehingga dapat menekan biaya penyelenggaraan urusan (*cost of service*).

Kedua, tujuan politisi dari pembentukan suatu daerah otonom. Untuk mencapai tujuan politisi pembentukan suatu daerah otonom secara efektif, yakni demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka dipersyaratkan pembatasan area pemerintahan daerah. Cakupan daerah yang terlalu luas akan menghambat tercapainya tujuan politis pembentukan suatu daerah otonom karena pemerintah daerah akan menjadi jauh dari masyarakatnya karena rendahnya intensitas hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya. Pada keadaan demikian kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi rendah dan akan mengakibatkan rendahnya akuntabilitas pemda dan memicu terjadinya praktek-praktek mal-administrasi.

Ketiga, karakter wilayah. Karakter wilayah juga menentukan apakah suatu daerah otonom perlu dibentuk atau tidak. Hal ini karena keberadaan Pemda adalah untuk melaksanakan jenis-jenis urusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Dasar filosofisnya adalah bahwa pemerintah ada karena adanya rakyat. Legitimasi yang diperoleh pemerintah dari rakyat melalui pemilu mengisyaratkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jenis kebutuhan rakyat tentu saja dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dimana mereka tinggal. Konsekuensinya, jenis-jenis kewenangan maupun urusan Pemda bisa berbeda-beda sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Daerah

dengan karakter perkotaan, seperti urusan air bersih, persampahan, pembangunan limbah, transportasi, dan sebagainya.

Keempat, bagi daerah perkotaan besaran kota juga menjadi pertimbangan bagi pembentukan satu daerah otonom kota. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk diatas satu juta jiwa membutuhkan kewenangan untuk menangani urusan yang berbeda dengan kota menengah dan kota kecil. Dari segi efisiensi, pemerintah kota metropolitan dianggap layak (*feasible*) untuk menangani urusan tertentu karena pelayanan yang diberikannya akan dapat memenuhi kriteria *economic of scale*. Namun demikian, aspek demokrasi unit pemerintahan di kota metropolitan akan menjadi semakin kompleks dan semakin jauh dari aspirasi masyarakatnya. Dari aspek ekonomi, munculnya kota-kota metropolitan akan membawa pengaruh (*leverage*) terhadap pertumbuhan ekonomi nasional tersebut cenderung sering menimbulkan kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Kelima, dari aspek batas wilayah, luas wilayah, luas area dan jumlah penduduk merupakan faktor yang mempengaruhi batas-batas wilayah pemerintah daerah (*Muthalib dan Khan, 1980*). Pertumbuhan penduduk akan mendorong perluasan pemukiman yang memiliki implikasi terhadap aspek ekonomi, politik, administrasi, dan wilayah kerja pemerintah daerah. *Catchment area* dari pemerintah daerah menjadi bertambah luas dan pengaruh perkotaan juga akan semakin besar. Untuk menjalankan kontrol

efektif terhadap *Catchment area* maka muncul ide pembentukan kota metropolitan yang memiliki bentuk pemerintahan kota dengan pola, struktur organisasi, pegawai maupun peranan yang khas bersifat perkotaan.

Pertumbuhan penduduk, pertumbuhan sosial, ekonomi, transportasi, teknologi dan sebagainya akan mengakibatkan terjadinya perubahan area secara cepat. Akibatnya batas-batas wilayah dan urusan pemerintah daerah yang didasarkan pada warisan historis atau tradisi akan cepat menjadi usang (*absolute*). Sebaliknya, ketergantungan antar daerah atau wilayah dalam berbagai urusan akan sangat dominan, seperti dalam hal transportasi, air bersih, listrik, pemukiman, persampahan dan sebagainya. Karena itu maka batas wilayah dan urusan pemerintahan daerah perlu ditata sedemikian rupa untuk memungkinkan Pemda menjalankan fungsinya secara efektif, yakni melindungi dan memfasilitasi kepentingan warganya. Untuk itu Pemda harus mengadaptasikan diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada warganya, baik yang berkaitan dengan perubahan cara hidup, pekerjaan maupun dinamika masyarakat lainnya. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan pelayanan yang membutuhkan *catchment area* yang luas maka kerjasama antar daerah akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai daerah penelitian, penulis kemudian memberikan gambaran umum daerah penelitian, dimana sangat memberikan andil dalam pelaksanaan penelitian terutama pada saat pengambilan data, dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Di sisi lain pentingnya mengetahui daerah penelitian, agar dalam pengambilan data dapat memudahkan pelaksanaan penelitian dengan mengetahui situasi baik dari segi kondisi wilayah, jarak tempuh dan karakteristik masyarakat sebagai objek penelitian.

3.1. Sejarah Singkat Kabupaten Bone

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330, mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroe Ri Bontoala, pertengahan abad ke-17 (A. Sultan Kasim, 2002). Kebesaran kerajaan Bone tersebut dapat pelajaran dan hikmah yang memadai bagi masyarakat Bone saat ini dalam rangka menjawab dinamika pembangunan dan perubahan-perubahan sosial, perubahan ekonomi,

pergeseran budaya serta dalam menghadapi kecenderungan yang bersifat global.

Belajar dan mengambil hikmah dari sejarah kerajaan Bone pada masa lalu minimal terdapat tiga hal yang bersifat mendasar untuk diaktualisasikan dan dihidupkan kembali karena memiliki persesuaian dengan kebutuhan masyarakat Bone dalam upaya menata kehidupan kearah yang lebih baik. Ketiga hal yang dimaksud adalah: *Pertama*, pelajaran dan hikmah dalam bidang politik dan tata pemerintahan. Dalam hubungannya dengan bidang ini, sistem kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi kedaulatan rakyat atau dalam terminology politik modern dikenal dengan istilah demokrasi. Ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut "ade' pitue", yaitu tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasehat raja.

Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh ade' pitue dan hasil keputusan musyawarah disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan. Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintah sangat mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berawal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia Bone yang hidup pada tahun 1507-1586 yang pernah disampaikan oleh Raja Bone seperti dikemukakan oleh Wiwiek P Yoesoep (1982:10) bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan kerajaan yaitu:

- Seuwani, Temmatinroi Matanna Arung MangkauE mitai munrinna gauE (Mata Raja tak terpejam memikirkan segala perbuatan).
- Maduanna, Maccapi Arung MangkauE duppai ada' (Raja harus pintar menjawab kata-kata).
- Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada' (Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban).
- Maepa'na, Tekkalupai surona mpawa ada tongeng (Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar).

Pesan Kajaolaliddong ini antara lain dapat diinterpretasikan kedalam pemaknaan yang mendalam bagi seorang raja betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat dipahami dan disikapi.

Kedua, yang menjadi pelajaran dan hikmah dari sejarah Bone terletak pada pandangan yang meletakkan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi sebagai bagian penting dari usaha membangun negeri agar menjadi lebih baik. Urgensi terhadap pandangan seperti itu tampak jelas ketika kita menelusuri puncak-puncak kejayaan Bone dimasa lalu.

Dan sebagai bentuk monumental dari pandangan ini dikenal dalam sejarah akan perjanjian dan ikrar bersama kerajaan Bone, Wajo, dan Soppeng yang melahirkan TELLUM POCCOE atau dengan sebutan lain "LaMumpatue Ri Timurung" yang dimaksukan sebagai upaya memperkuat posisi kerajaan dalam menghadapi tantangan dari luar.



Kemudian pelajaran dan hikmah yang *ketiga* dapat dipetik dari sejarah kerajaan Bone adalah warisan budaya kaya dengan pesan. Pesan kemanusiaan yang mencerminkan kecerdasan manusia Bone pada masa lalu. Banyak referensi yang bisa dipetik dari sari pati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan, dalam menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk dan dinamikanya. Demikian halnya (kabupaten Bone) potensi yang besar yang dimiliki, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat.

Potensi itu cukup beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata dan potensi lainnya. Demikian masyarakatnya dengan berbagai latar belakang pengalaman dan pendidikan dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendorong pelaksanaan pembangunan Bone itu sendiri. Walaupun Bone memiliki warisan sejarah dan budaya yang cukup memadai, potensi sumber daya alam serta dukungan SDM, namun patut digaris bawahi jika saat ini dan untuk perkembangan ke depan Bone akan berhadapan dengan berbagai perubahan dan tantangan pembangunan yang cukup berat.

Oleh karena itu diperlukan pemikiran, gagasan dan perencanaan yang tepat dalam mengorganisir warisan sejarah, kekayaan budaya, dan potensi yang dimiliki ke dalam suatu pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.

Tabel 3.1.1
Sejarah Singkat Pemerintahan Bone
dan Daftar Susunan Raja-Raja Bone

RAJA KE	NAMA DAN GELAR	TAHUN MEMERINTAH	JENIS KELAMIN
1	ManurungE Ri Matajang Mata Si Lompoe	± 1330 – 1365	Pria
2	Laummasa' – Petta Panre BessiE	± 1365 – 1368	Pria
3	La Saliu Kerang Pelua	± 1368 – 1470	Pria
4	We Benrigau' – MallajangE ri Cina	± 1470 – 1510	Wanita
5	Latenri Sukki – MappajungE	± 1510 – 1535	Pria
6	La Ulio' – Bote'E – MatinroE ri Itterung	± 1535 – 1560	Pria
7	La Tenri Rawe – BongkangngE Matinro ri Gucinna	± 1560 – 1564	Pria
8	La Icca – MatinroE ri Addenenna	± 1564 – 1565	Pria
9	La Pattawe' – MatinroeE ri Bettung	± 1565 – 1602	Pria
10	I Tenri Tuppu – MatinroE Sidenreng	± 1602 – 1611	Wanita
11	La Tenri Ruwa – Sultan Adam MatinroE ri BantaEng	± 1611 – 1616	Pria
12	La Tenri Pale – MatinroE ri Tallo	± 1616 – 1631	Pria
13	La maddaremmeng – MatinroE ri Bukaka	± 1631 – 1644	Pria
14	La Tenri Waji Arung Awangpone MatinroE ri Siang (PANGKEP)	± 1644 – 1645	Pria
15	Latenri Tatta Daeng Serang MalampeE Gemme'na Arung Palakka	± 1645 – 1696	Pria
16	La Patau' Matanna Tikka MatinroE ri Nagauleng	± 1696 – 1714	Pria
17	Batari Toja Sultan Zainab Zukiyahuddin	± 1714 – 1715	Wanita
18	La Padassajati To Appaware Sultan Sulaeman Petta ri JalloE	± 1715 – 1718	Pria
19	La Pareppa To Sappewali Sultan Ismail MatinroE ri Sombaopu	± 1718 – 1721	Pria
20	La Panongi – To Pawawoi Arung Mampu Karaeng Bisei	± 1721 – 1724	Pria
21	Batari Toja Datu Talaga Arung Timurung	± 1724 – 1749	Wanita
22	La Temmasonge To Appawali Sultan Abd.Razak MatinroE ri Mallimongeng	± 1749 – 1775	Pria
23	La Tenri Tappu – Sultan Ahmad Saleh	± 1775 – 1812	Pria
24	To Appatunru – Sultan Ismail Muhtajuddin MatinroE ri Lalebata	± 1812 – 1823	Pria
25	I Mani Ratu Arung Data Sultan Rajituddin MatinroE ri Kessi	± 1823 – 1835	Wanita
26	La Mappaselling - Sultan Adam Najamuddin MatinroE ri Salassa'na	± 1835 – 1845	Pria
27	La Parenrengi Sult.Akhmad Muhiddin ArungPugi MatinroE riAjangBenteng	± 1845 – 1857	Pria
28	Wetenria Wa Ummulhuda Pancaitanya-BesseKajuara Matinroe ri Majennang	± 1857 – 1860	Wanita
29	Akhmad Singkerurukka Sultan Akhmad Idris MatinroE ri To Paccing	± 1860 – 1871	Pria
30	Fatimah Banri Datu Citta MatinroE ri Bolampare'na	± 1871 – 1895	Wanita
31	Lapawawoi – Karaeng Sigeri MatinroE ri Bandung	± 1895 – 1905	Pria
32	La Mappanyukki Sultan Ibrahim MatinroE ri Gowa	± 1905 – 1946	Pria
33	La Pabbenteng Pt. MatinroE ri Matuju	± 1946 – 1951	Pria

Tabel 3.1.2
Nama-Nama Pimpinan Yang Memerintah
Daerah Bone Secara Berurutan

No	Nama yang Memerintah	Masa Pemerintahan
1	Abdul Rachman Daeng Mangung (Kepala Afdeling)	Tahun 1951
2	Andi Pangerang Daeng Rani (Kepala Afdeling/Kepala Daerah)	Tahun 1951 - 1955
3	Ma'mun Daeng Mattiro(Kepala Daerah)	Tahun 1955 - 1957
4	H. A. Mappanyukki Sult. Ibrahim MatinroE ri Gowa (Kepala Daerah/Raja Bone)	Tahun 1957 - 1960
5	Andi Suradi (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1960 – 1966
6	Andi Djamuddin (Pejabat Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1966 – 1966
7	Andi Tjatjo (yang menjalankan tugas Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1966 – 1967
8	Andi Baso Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1967 – 1969
9	Suaib (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1969 – 1976
10	H.P.B. Harahap (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1976 – 1982
11	H. Andi Madeali (Pejabat Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1982 – 1983
12	Andi Syamsu Alam (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1983 – 1988
13	Andi sjamsoel alam (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1988 – 1993
14	Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1993 – 1998
15	Andi Muhammad Amir (Bupati Kepala Daerah)	Tahun 1998 – 2003
16	H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone)	Tahun 2003 – 2008
17	H. Andi Muh. Idris Galigo (Bupati Bone)	Tahun 2008 – skrng

Pada tahun 1905 Kerajaan Bone jatuh ketangan penjajah dan terbentuk pemerintahan sendiri (Zelf Bestur) di bawah pengawasan Belanda, berhubung karena sejak tertangkapnya Raja Bone Lapawawoi Karaeng Sigeri, tahta Kerajaan Bone tidak terisi maka atas usaha Belanda pada tahun 1931 diangkat Latenri Sukki (Andi Mappanyukki) putra dari La Makkulawu Karaeng Lembampareng Sombaya ri Gowa menjadi Raja Bone ke-32 (1931-1946). Oleh karena itu Raja Bone ke-32 tidak menerima keberadaan NICA maka pada awal 1946, menarik diri dari tahta Kerajaan dan digantikan oleh

Raja Bone ke-33 La Pabbenteng Petta MatinroE ri Matuju yang bertakhta (1946–1951).

Selanjutnya sistem kerajaan berubah dan mengikuti sistem Pemerintahan Republik Indonesia dan adapun nama-nama pimpinan yang memerintah Daerah Bone secara berurutan dapat dilihat pada tabel 3.1.2.

Kabupaten Bone terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) kecamatan yang dirinci menjadi 333 (tiga ratus tiga puluh tiga) desa dan 39 (tiga puluh sembilan) kelurahan dengan jumlah dusun sebanyak 888 (delapan ratus delapan puluh delapan) dan lingkungan sebanyak 121 (seratus dua puluh satu). Wilayah Kecamatan **Bontocani** terdiri dari 10 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kahu** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Kajuara** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Salomekko** terdiri dari 7 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tonra** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Patimpeng** terdiri dari 10 desa. Kecamatan **Libureng** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Mare** terdiri dari 17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Sibulue** terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Cina** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Barebbo** terdiri dari 18 desa. Kecamatan **Ponre** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lappariaja** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Lamuru** terdiri dari 11 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu Limpoe** terdiri dari 11 desa. Kecamatan **Bengo** terdiri dari 9 desa. Kecamatan **Ulaweng** terdiri dari 14 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Palakka** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Awangpone** terdiri dari

17 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tellu Siattinge** terdiri dari 15 desa dan 2 kelurahan. Kecamatan **Amali** terdiri dari 15 desa. Kecamatan **Ajangale** terdiri dari 14 desa. Kecamatan **Dua Boccoe** terdiri dari 21 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Cenrana** terdiri dari 15 desa dan 1 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang Barat** terdiri dari 8 kelurahan. Kecamatan **Tanete Riattang** terdiri dari 8 kelurahan. Serta Kecamatan **Tanete Riattang Timur** terdiri dari 8 kelurahan juga.

Berdasarkan Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 15 Pebruari 1990 ditetapkan hari jadi Bone pada tanggal 6 April 1330. Dengan demikian Hari Ulang Tahun Bone ditetapkan pada tanggal 6 April.

3.2. Kondisi Geografis Bone Selatan

Ditinjau dari luas wilayah, Kabupaten Bone memiliki luas area yang cukup besar yakni 4.559 km^2 yang tersebar dalam 27 kecamatan. Dari 27 kecamatan tersebut Kecamatan Bontocani yang berada di wilayah Bone bagian selatan merupakan kecamatan terluas ($463,35 \text{ km}^2$) atau 10,16 % dari luas Kabupaten Bone, sedangkan luas wilayah Bone bagian selatan yang tersebar di 7 kecamatan mencapai $1.536,93 \text{ km}^2$ atau 33,71 % dari luas Kabupaten Bone. Dengan kata lain, apabila wilayah Bone bagian selatan ini dimekarkan dari wilayah induknya Kabupaten Bone, maka Kabupaten Bone wilayahnya akan berkurang menjadi $3.022,07 \text{ km}^2$.

Kondisi geografis Bone selatan dapat dilihat dari luas wilayah, jarak wilayah dari watampone (ibukota kabupaten Bone) dan keadaan jenis tanah yang akan terperinci melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.1
Luas Wilayah Bone Selatan
Area by District in Bone Selatan

Kode Wilayah Area Code	Kecamatan District	Luas Area (km ²)	Perentase Percentage
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Bontocani	463.35	10.16
020	Kahu	189.50	4.16
030	Kajuara	124.13	2.27
040	Salomekko	84.91	1.86
050	Tonra	200.32	4.39
060	Patimpeng	130.47	2.86
070	Libureng	344.25	7.55
Jumlah – Total		146.118	3.148

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Salah satu kendala dalam hal pelayanan masyarakat adalah jarak dari tempat tinggal ke tempat pelayanan dan cakupan luas wilayah yang menjadi tanggungjawab petugas yang memberikan pelayanan. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pusat pelayanan umumnya berada di Ibu Kota Kabupaten. Meskipun berdasarkan observasi dan wawancara mendalam menunjukkan bahwa masyarakat masih ada yang pro dan kontra terhadap persoalan pemekaran, namun kecenderungan yang muncul ke permukaan, mereka nampaknya dipersatukan dalam persepsi dan kepentingan ketika mempersoalkan jarak ibukota kabupaten yang cukup jaⁿ

dari kecamatan. Ditinjau dari jarak, wilayah kecamatan yang "*jaraknya relatif cukup jauh dari ibukota kabupaten*", cenderung mendukung pemekaran Kabupaten Bone. Demikian pula halnya dengan "*jangkauan pelayanan*" pemerintah kabupaten yang dirasakan kurang sebagai akibat terlalu luasnya cakupan wilayah yang harus ditangani. Kedua aspek ini menjadi alat perekat dalam memperjuangkan pemekaran wilayah Bone bagian selatan, baik bagi para tokohnya, maupun masyarakat yang bermukim di wilayah itu.

Jarak tempuh rata-rata dari setiap ibukota kecamatan (Bone bagian selatan) ke Ibu Kota Kabupaten adalah 79,43 km, suatu jarak yang cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi terutama yang berasal dari kecamatan yang cukup jauh dengan Ibu Kota Kabupaten (Kec. Bontocani, Kahu, Libureng).

Tabel 3.2.2
Jarak Dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan Bone Selatan
Distance from capital regency to ceveral district towns

Ibukota Kabupaten <i>Capital of Regency</i>	Ibukota kecamatan <i>District Towns</i>	Jarak <i>Distance</i> (km)
(1)	(2)	(3)
Watampone	Bontocani	112
	Kahu	100
	Kajuara	70
	Salomekko	62
	Tonra	52
	Patimpeng	77
	Libureng	83

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Tabel 3.2.3
Luas Wilayah Bone Selatan Menurut Ketinggian
The Height of Each Area by District in Bone Selatan

Kode Wilayah Area code	Kecamatan district	Luas Tiap Ketinggian Di Atas Permukaan Laut Area by Height above Sea Level (Ha)				
		0-25 m	25-100 m	100-500 m	500-1000 m	>1000 m
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Bontocani	-	-	14.500	24.935	6.900
020	Kahu	-	2.200	16.670	80	-
030	Kajuara	3.150	5.490	750	-	-
040	Salomekko	2.470	942	3.385	-	-
050	Tonra	4.280	8.958	3.723	-	-
060	Patimpeng	-	468	16.927	417	-
070	Libureng	-	-	33.665	760	-
JUMLAH – Total		9.900	18.058	89.620	26.192	6.900

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Tabel 3.2.4
Luas Wilayah Tanah Usaha Tiap Kecamatan di Wilayah Bone Selatan
The Area of Cultivating Land by District in Bone Selatan

Kecamatan District	Wilayah Tanah Usaha - Area of Cultivating Land		
	Terbatas/ Limit 1 0-7	Utama/ Main 1 A,B 7-25	Utama/ Main 1 C 25-100
(1)	(2)	(3)	(4)
Bontocani	-	-	30
Kahu	-	-	1.885
Kajuara	1.240	2.395	5.330
Salomekko	440	2.100	945
Tonra	460	3.820	8.985
Patimpeng	-	-	468
Libureng	-	-	3.970
JUMLAH - Total	2.140	8.315	21.613

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Tabel 3.2.5
Keadaan Jenis Tanah di Wilayah Bone Selatan
Type of Soil District in Bone Selatan

Kecamatan <i>District</i>	ALLVIAL	GLEIHUMUS	LITOSOL	REGOSOL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bontocani	-	-	2460	-
Kahu	-	-	-	-
Kajuara	2500	-	-	-
Salomekko	1080	-	-	-
Tonra	1835	-	-	-
Patimpeng	-	-	677	-
Libureng	1980	3745	145	2170
Jumlah	7.395	3.745	3.291	2.170

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

3.3. Pemerintahan Bone Selatan

Seperti yang dipaparkan sebelumnya, apabila wilayah Bone bagian selatan dimekarkan dari wilayah induknya Kabupaten Bone, maka Kabupaten Bone wilayahnya akan berkurang menjadi 3.022,07 km². Berkurangnya wilayah administratif pemerintahan tersebut, pada satu sisi mengurangi potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola oleh Kabupaten Bone, akan tetapi pada sisi yang lain juga dapat mengurangi beban dari manajemen pemerintahan.

Pemerintahan Bone Selatan secara administrasi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, 93 (sembilan puluh tiga) desa, 5 (lima) kelurahan, 195 (seratus sembilan puluh lima) dusun, dan 14 (empat belas) lingkungan. Dan secara spesifik digambarkan pada tabel 3.3.1.



Tabel 3.3.1
Pembagian Wilayah Administrasi Bone Selatan
Administrative Division of Bone Selatan

Kode Wilayah Area code	Kecamatan District	Desa Village	Kelurahan Urban Village	Dusun Sub Village	Lingkungan SubUrban Village
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
010	Bontocani	10	1	29	4
020	Kahu	19	1	43	2
030	Kajuara	17	1	44	3
040	Salomekko	7	1	17	2
050	Tonra	11	-	28	-
060	Patimpeng	10	-	25	-
070	Libureng	19	1	9	3
Jumlah		93	5	195	14

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Tabel 3.3.2
Nama Ibukota Kecamatan Dan Banyaknya Desa/Kelurahan Bone Selatan
District Capital And Number Of Village In Bone Selatan

Kode Wilayah Area code	Kecamatan District	Ibukota Capital	Jumlah Desa/kelurahan Total village/urban village
(1)	(2)	(3)	(4)
010	Bontocani	Kahu	11
020	Kahu	Palattae	20
030	Kajuara	Bojo	18
040	Salomekko	Manera	8
050	Tonra	Bulu-Bulu	11
060	Patimpeng	Latobang	10
070	Libureng	Camming	20
JUMLAH – Total			98

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

3.4. Penduduk Bone Selatan

Jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan, mobilitas, dan persebaran penduduk dengan berbagai karakteristiknya merupakan beberapa aspek diantara sekian banyak aspek sosial demografi yang mempunyai hubungan pengaruh timbal balik dengan pembangunan serta berbagai kondisi yang berkembang pada suatu wilayah. Pada satu sisi, penduduk dengan jumlah yang besar akan mengurangi daya dukung lingkungan alam dan lingkungan sosial dan berpotensi memicu konflik internal dan eksternal dalam memperebutkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, namun pada sisi lain penduduk yang besar dapat pula dinilai sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dapat menggerakkan pembangunan.

Perkembangan jumlah penduduk (aspek kuantitas), disertai dengan perkembangan aspek-aspek sosial demografi lainnya seperti tingkat pendidikan, karakteristik kegiatan ekonomi dan sebagainya (aspek-aspek kualitas), juga sangat erat kaitannya dengan perkembangan stabilitas kehidupan masyarakat. Jumlah penduduk yang besar dengan laju pertumbuhan yang masih tinggi, disertai cepatnya perkembangan bidang pendidikan seperti yang terjadi di negara-negara sedang berkembang pada umumnya, akan diperhadapkan pada masalah penciptaan lapangan kerja yang remuneratif untuk menjamin tersedianya sumber penghasilan yang memadai bagi penduduk. Dalam kondisi perkembangan ekonomi yang tidak

secepat dinamika sosial demografi tersebut di atas, dapat mendorong berakumulasinya jumlah kalangan tenaga-tenaga kerja terdidik, yang pada gilirannya akan sangat mudah memicu timbulnya berbagai bentuk keresahan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat. Akan tetapi pada sisi lain, perkembangan aspek-aspek kualitas penduduk, memiliki dampak positif dalam nilainya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, yang kelak diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan dengan lebih cepat. Dalam aspek kehidupan masyarakat lainnya, perkembangan kualitas penduduk yang ditandai dengan peningkatan proporsi penduduk yang berpendidikan lebih baik dari waktu ke waktu, akan mendorong warga masyarakat lebih bersikap rasional, kritis, serta aspiratif dalam menyikapi berbagai perkembangan lingkungan sosial.

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti Program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.

Populasi penduduk Bone selatan akhir tahun 2007 menurut data yang ada sebanyak 152.355 (seratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima puluh lima

ribu yawa) dengan populasi terbesar berada pada kecamatan Kahu yakni 35.801 (tiga puluh lima ribu delapan ratus satu ribu nyawa) yang secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 3.4.1.

Tabel 3.4.1
Penduduk Bone Selatan Dirinci Menurut Kecamatan
Population of Bone Selatan by District

Kode Wilayah Area Code	Kecamatan District	2003	2004	2005	2006	2007
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
010	Bontocani	15.240	15.295	15.434	15.487	15.549
020	Kahu	35.090	35.217	35.536	35.659	35.801
030	Kajuara	31.316	31.430	31.714	31.825	31.950
040	Salomekko	13.501	13.550	13.673	13.720	13.774
050	Tonra	11.301	11.342	11.445	11.484	11.530
060	Patimpeng	14.344	14.396	14.527	14.577	14.634
070	Libureng	28.539	28.642	28.902	29.002	29.117
JUMLAH – Total		149.331	149.872	151.231	151.754	152.355

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Tabel 3.4.2
Penduduk Bone Selatan Dirinci Menurut Jenis Kelamin
Population of Bone Selatan by Sex

Kode Wilayah Area Code	Kecamatan District	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
010	Bontocani	7.698	7.851	15.549
020	Kahu	17.030	18.771	35.801
030	Kajuara	15.315	16.635	31.950
040	Salomekko	6.561	7.213	13.774
050	Tonra	5.429	6.101	11.530
060	Patimpeng	7.037	7.598	14.635
070	Libureng	14.292	14.825	29.117
JUMLAH – Total		73.362	78.994	152.356

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

3.5. Keadaan Sosial

3.5.1. Pendidikan (*Education*)

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah, maka semakin berhasil pembangunan manusianya yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas masyarakatnya. Tentu saja terdapat indikator lain, seperti harapan hidup, angka melek huruf, atau standar hidup layak (*purchasing power parity*). Maka untuk mencapainya tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang cukup dan seimbang antara penduduk yang layak sekolah dengan jumlah sekolah yang tersedia, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.

Masalah pendidikan di Kabupaten Bone adalah bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan iman dan taqwa terhadap Tuhan YME, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti, kepribadian dan semangat kebangsaan sehingga dapat menumbuhkan manusia-manusia yang mampu membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggungjawab atas pembangunan bangsa.

Dalam rangka mencerdaskan bangsa serta meningkatkan partisipasi sekolah, penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, baik pendidikan formal maupun non formal.

Tabel 3.5.1.1., memberikan gambaran yang jelas mengenai jumlah sekolah, murid dan guru pada seluruh jenjang pendidikan di wilayah Bone Selatan.

Tabel 3.5.1.1
Banyaknya Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Madrasah Ibtidaiyah, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi

Kecamatan <i>District</i>	TK	SD	MI	SLTP	MTS	SLTA	MA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Bontocani	8	23	1	3	2	1	-
Kahu	45	29	8	5	5	1	3
Kajuara	22	30	2	2	3	1	2
Salomekko	11	13	2	2	2	1	1
Tonra	16	15	-	1	2	1	-
Patimpeng	9	13	3	2	2	1	1
Libureng	16	30	2	6	2	2	-
Jumlah	127	153	18	21	18	8	7

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Tabel 3.5.1.2
Banyaknya Guru dan Murid di Bone Selatan
Number of Teacher and Pupils by District in Bone Selatan

Kecamatan	GURU				MURID			
	TK	SD/ MI	SLTP/ MTS	SLTA/ MA	TK	SD/ MI	SLTP/ MTS	SLTA/ MA
Bontocani	18	164	64	18	295	2.398	407	87
Kahu	109	401	193	121	1.799	4.628	2.138	1.876
Kajuara	52	299	91	71	1.020	4.296	1.266	896
Salomekko	32	133	67	39	488	2.301	828	120
Tonra	49	160	60	35	626	1.732	454	444
Patimpeng	22	165	80	40	385	2.193	728	243
Libureng	44	283	147	41	635	3.961	1413	689
Jumlah	329	1.605	702	365	5.248	21.509	7.234	4.355

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

3.5.2. Kesehatan (*Health*)

Pelayanan kesehatan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan masyarakat, dan salah satu tujuan pembangunan di bidang kesehatan adalah diharapkan dapat menghasilkan derajat kesehatan yang lebih tinggi dan memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial maupun ekonomis. Sekalipun kondisi kesehatan penduduk masih belum terlalu memadai, tetapi selama dua tahun terakhir sudah terdapat gejala yang semakin membaik. Hal ini misalnya ditandai dengan semakin menurunnya jumlah bayi yang lahir mati (*stillbirth*) dan ditunjang oleh terus bertambahnya peserta KB. Selama tahun 2006/2007 terdapat peserta akseptor KB yang cukup besar dan juga ditandai dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mengalami penurunan.

Penyediaan sarana pelayanan kesehatan berupa rumah sakit, puskesmas, dan tenaga kesehatan seyogyanya semakin ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, seperti peyediaan obat-obatan, alat kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan peningkatan penyuluhan di bidang kesehatan.

Dari segi kesehatan Bone Selatan mempunyai 1 (satu) unit Rumah Sakit dan beberapa sarana-sarana kesehatan lainnya yang akan digambarkan pada tabel 3.5.2.1.

Tabel 3.5.2.1
Banyaknya puskesmas dan posyandu di bone selatan
Number of public health center and child health centre by district Bone selatan

Kecamatan <i>District</i>	Puskesmas <i>Public Health Center</i>	Posyandu <i>Child Health Centre</i>
Bontocani	1	31
Kahu	2	46
Kajuara	1	31
Salomekko	1	21
Tonra	1	23
Patimpeng	1	25
Libureng	2	52
Jumlah	9	229

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

Dari segi keagamaan di Bone bagian selatan hampir seluruhnya beragama Islam dan merupakan pemeluk yang taat. Kondisi ini ditunjukkan dengan banyaknya tempat ibadah agama Islam dan pemuka-pemuka agama Islam yang dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5.2.2
Banyaknya Tempat Ibadah Menurut Agama dan Pemuka Agama Islam di Bone Selatan

Kecamatan <i>District</i>	Masjid	Mushala	Langgar	Gereja/dll	Pemuka agama
Bontocani	32	8	-	-	40
Kahu	47	10	-	-	59
Kajuara	47	6	-	-	28
Salomekko	30	1	-	-	41
Tonra	25	-	-	-	22
Patimpeng	28	17	-	-	30
Libureng	52	2	20	-	51
Jumlah	261	44	20		271

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2008

3.6. Potensi Daerah Terhadap Investor

Pada bagian potensi daerah akan membahas tentang pertanian, perindustrian, pertambangan dan energi, perkebunan dan kehutanan, perikanan, peternakan dan pariwisata yang kesemuanya akan dijelaskan sebagai berikut :

3.6.1. Pertanian

Pertanian di Bone Selatan cukup besar dalam hal tanaman pangan dengan luas persawahan 20.945 Ha yang tersebar di tujuh kecamatan, yang terdiri dari :

- Irigasi Desa: 1.906 Ha
- Tadah Hujan: 19.036 Ha

Hasil pertanian tanaman pangan 2005

- a. Padi dengan luas panen 28.629 Ha dan hasil produksi 140.160Ton.
- b. Palawija
 - Jagung: luas panen 3.632 Ha dan hasil produksi 8.905 Ton.
 - Ubi kayu: luas panen 152 Ha dan hasil produksi 1.605 Ton.
 - Ubi jalar: luas panen 62 Ha dan hasil produksi panen 595 Ton.
 - Kacang tanah: luas panen 5.585 Ha dan hasil produksi panen 7.878 ton.

- Kedelai: luas panen 1 Ha dan hasil produksi panen 2 Ton.
- Kacang Hijau: 1.571 Ha dan hasil produksi panen 2.222 Ton.

3.6.2. Perindustrian

Perindustrian di kabupaten Bone terdiri dari dua jenis industri yakni jenis industri kecil dan kerajinan serta jenis industri pengolahan hasil pertanian perkebunan, perikanan kehutanan dan bahan galian. Khususnya di Bone Selatan.

Peluang Investor di Bidang Industri

- Industri Air Minum dalam Kemasan (AMIK) yang terdapat di kecamatan Kajuara.
- Industri Pengolahan Marmer yang terdapat di kecamatan Bonto Cani.

3.6.3. Pertambangan dan Energi

Prospek Pertambangan dan Energi di Bone Selatan sangat besar dengan jenis bahan tambang antara lain.

- Emas. Terdapat di Desa Talabalangi kecamatan Patimpeng, juga di Desa Langi Kecamatan Patimpeng.
- Batu Bara. Terdapat di Desa Nusa Kecamatan Kahu

- Tembaga, Bauksit, Timbal, dan Seng. Terdapat di Kecamatan Patimpeng, Bonto Cani dan Salomekko
- Biji Mangan. Terdapat di Desa Langi Kecamatan Bonto Cani.
- Marmer, Batu Sabak. Terdapat di Desa Watang Cani Kecamatan Bonto Cani, dan di Kecamatan Kahu.
- Pasir Kwarsa. Terdapat di Kelurahan Nusa Kecamatan Kahu, desa Lemo Kecamatan Kajuara, dan di kecamatan Bonto Cani.

Peluang Investor di Bidang Pertambangan dan Energi

- Pertambangan Emas di Kecamatan Patimpeng
- Pertambangan Baut Bara di Kecamatan Kahu.
- Pertambangan Marmer di Kecamatan Bonto Cani.

3.6.4. Perkebunan dan Kehutanan

Potensi perkebunan dan kehutanan di Bone Selatan terbilang cukup memadai dengan berbagai komoditi tanaman industri dengan luas lahan perkebunan dan kehutanan 15.072 Ha.

Hasil-hasil perkebunan dan kehutanan tahun 2005 antara lain:

- Kelapa: luas panen 3.896 Ha dan hasil produksi 2.288 Ton.
- Kopi: luas panen 482 Ha dan hasil produksi 128 Ton.

- Kapok: luas panen 32 Ha dan hasil produksi 17 Ton.
- Cengkeh: luas lahan 2.040 Ha dan hasil produksi 913 Ton.
- Pala: luas panen 1 Ha dan hasil produksi 0,25 Ton.
- Lada: luas panen 439 Ha dan hasil produksi 50 Ton.
- Kakao: luas panen 5.714 Ha dan hasil produksi 2.591 Ton.
- Jambu Mentre: luas panen 2.942 Ha dan hasil produksi 950 Ton
- Vanili: luas panen 67 Ha dan hasil produksi 4 Ton.
- Pinang: luas panen 126 Ha dan hasil produksi 40 Ton.

Peluang Investasi di bidang Perkebunan dan Kehutanan

- Perkebunan Vanili di Kecamatan Bonto Cani, Kahu, dan Kajuara.
- Perkebunan Cengkeh di Kecamatan Bonto Cani, Kahu, Kajuara, Tonra, dan Mare.
- Perkebunan Lada di Kecamatan Bonto Cani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Tonra, Patimpeng, dan Mare.
- Pengolahan Rotan di Kecamatan Bonto Cani.

3.6.5. Perikanan

Di bidang perikanan sangat ideal dengan potensi penangkapan ikan di sekitar teluk Bone dengan panjang pantai 127 Km sampai puluhan mil ke tengah laut, potensi perikanan di Bone khususnya di Bone Selatan dapat kita rincikan menurut jenis produksi yakni:

- Udang dengan luas areal budi daya 882 Ha dengan jumlah produksi 34.020 Ton.
- Kepiting dengan luas areal budi daya 147 Ha dengan jumlah produksi 3020 Ton.
- Rumput laut dengan luas areal budi daya 406 Ha dengan jumlah produksi 20.292 Ton.
- Bandeng dengan luas areal budi daya 363 Ha dengan jumlah produksi 20.292 Ton.

Peluang Investasi

- Pengembangan udang, kepiting, rumput laut, serta badeng di kecamatan Kajuara, Salomekko, Tonra, dan Mare.
- Budi daya Rumput laut di sepanjang pantai dan pesisir teluk Bone.
- Pengolahan dan pengawetan ikan serta biota perairan lainnya.

- Sarana penunjang (pembenihan ikan/ udang dan TPI).

3.6.6. Peternakan

Jenis ternak yang dikembangkan di Bone Selatan meliputi: sapi kerbau, kambing, ayam dan itik. Dengan umlah produksi pada tahun terakhir sebesar 414.989 ekor yang jika diuraikan secara lebih khusus sebagai berikut:

- Sapi: 41.011 ekor
- Kerbau: 4.080
- Kuda: 3.126
- Kambing: 2.814 ekor
- Ayam Ras Petelur: 10.400 ekor
- Ayam Ras Pedaging: 13.390 ekor
- Ayam Ras Buras: 329.288 ekor.

Peluang Investasi

- Usaha pengemukan sapi di tujuh kecamatan yakni Bonto Cani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Tonra, Patimpeng, dan Mare.
- Peternakan kerbau, kuda, kambing, ayam buras dan itik di tujuh kecamatan di Bone Selatan.



- Industri pakan ternak.

3.6.7. Pariwisata

Di Bone Selatan objek pariwisata jika dikelola dengan baik akan mampu menarik wisatawan dari dalam maupun luar negeri sehingga dengan sendirinya akan memberikan pemasukan daerah yang menguntungkan khususnya Bone selatan, adapun potensi wisata di Bone selatan yakni:

a. Objek Wisata Alam

- Goa Bola Batu di desa Tellongeng kecamatan Mare.
- Pantai Bone Lampe di desa Bulu-bulu kecamatan Tonra.
- Pasir Putih Gareccing di desa Gareccing kecamatan Tonra.
- Pantai Ancu Lampu Toae di desa Ancu kecamatan Kajuara.
- Bendungan Sanrego di desa Sanrego kecamatan Kahu.
- Pemandian Waetuo di desa Abbumpungeng kecamatan Kajuara.
- Air Terjun Ulu Ere di desa Bontojai kacamatan Bonto Cani.

b. Objek Wisata Budaya

- Makam Datu Salomekko di desa Manare kecamatan Salomekko.
- Ajjongang di desa Patimpeng kecamatan Patimpeng.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Karakteristik Responden

Karakteristik responden sengaja diangkat dalam penelitian ini karena dengan mengetahui karakteristik serta identitas responden yang nantinya bakal menjadi obyek penelitian, tentunya akan mempermudah dalam menyelesaikan masalah-masalah yang nantinya peneliti angkat didalam penelitian yang dijalankan. Oleh karena itu, maka peneliti memandang penting adanya karakteristik dan identitas responden sebagai bagian dalam pembahasan ini.

4.1.1. Usia Responden

Tabel 4.1.1
Distribusi Responden Menurut Usia

No.	Klasifikasi Usia	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1	≤ 29 tahun	16	26.67
2	30 – 34 tahun	13	21.67
3	35 – 39 tahun	5	8.33
4	40 – 44 tahun	4	6.67
5	45 – 49 tahun	9	15
6	≥ 50 tahun	13	21.66
Jumlah		60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Berdasarkan tabel 4.1.1 nampak bahwa umumnya responden berada pada usia yang relative muda, yakni usia kurang dari hingga 29 tahun sebanyak 16 responden (26.6 %). kemudian pada urutan kedua kategori usia 30 – 34 tahun yang sama banyaknya dengan usia 50 tahun ke atas yakni

sebanyak 13 responden (21.6 %), disusul kategori usia 45 – 49 tahun sebanyak 9 responden (15 %), sedangkan pada usia 35 – 39 tahun sebanyak 5 responden (8.3 %). Dan pada kategori terakhir yakni usia 40 - 44 tahun keatas sebanyak 4 responden (6.6 %).

Pengelompokan umur seperti yang nampak pada tabel 4.1.1., dimaksudkan untuk kemudahan dalam penelitian ini atau efisiensi dan tidak akan mengurangi validitas data-data dalam penelitian ini. Tentunya dengan melihat variasi umur responden maka dalam memberikan jawaban nantinya akan bervariasi pula.

4.1.2. Jenis Kelamin

Tabel 4.1.2
Distribusi responden menurut jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Laki-laki	45	75
Perempuan	15	25
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Dari data 4.1.2., terlihat bahwa jumlah responden laki-laki adalah 45 orang atau dengan persentase 75%, sedangkan perempuan adalah 25 atau 25%. Rasio ini dapat terjadi karena kami sengaja memilih laki-laki menjadi responden yang mayoritas dengan anggapan yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan bahwa laki-laki yang banyak mendominasi aktivitas

keseharian, sedangkan kaum perempuan hanya menjadi pekerja pasif di rumah yakni sebagai ibu rumah tangga.

4.1.3. Pendidikan Terakhir

Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas penduduk. Semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah, maka semakin berhasil pembangunan manusianya yang pada akhirnya ikut menentukan kualitas masyarakatnya. Tentu saja terdapat indikator lain, seperti harapan hidup, angka melek huruf, atau standar hidup layak (*purchasing power parity*). Maka untuk mencapainya tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang cukup dan seimbang antara penduduk yang layak sekolah dengan jumlah sekolah yang tersedia, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi.

Selanjutnya adalah distribusi responden menurut tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel 4.1.3. Jumlah responden lulusan SLTA mendominasi dengan jumlah 21 orang atau sebanyak 35% dari total seluruh responden. Selanjutnya, disusul jumlah alumni universitas dengan 17 orang atau 28,33%. Jumlah yang paling sedikit adalah responden tamatan SD/ sederajat dengan jumlah 5 orang responden atau 8,33%. Sedangkan tamatan SLTP dan Diploma dengan masing-masing 9 orang atau 15% dan 8 orang atau 13,33%.

Adapun responden tamatan SLTA adalah banyak didominasi oleh mereka yang sekarang berkerja sebagai PNS di berbagai instansi pemerintah, pedagang dan wiraswasta serta beberapa yang masih menduduki bangku kuliah. Lulusan universitas terdiri dari tenaga pengajar di beberapa sekolah-sekolah. Selanjutnya, para petani dan sopir menjadi responden yang memiliki tingkat pendidikan hanya sebatas SD dan SLTA. Dalam penelitian ini kami tidak menemukan responden yang sama sekali belum pernah mengenyam pendidikan formal apapun.

Tabel 4.1.3.1
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tidak pernah sekolah	-	0
SD/ sederajat	5	8.34
SLTP/ sederajat	9	15
SLTA/ sederajat	21	35
Diploma	8	13.33
Universitas	17	28.33
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Sesuai dengan indikator yang digunakan dalam PP 129 Tahun 2000, tampaknya, perbandingan antara kondisi pada tujuh kecamatan di Bone bagian selatan dan Kabupaten Bone secara keseluruhan tidaklah jauh berbeda. Capaian skor rata-rata dari 4 indikator yang tersedia (lihat tabel

4.1.3.2) juga menunjukkan hal yang sama. Apabila skor minimal 4 (sesuai PP 129 Tahun 2000) yang dijadikan acuan, maka rerata keempat indikator tersebut baik untuk wilayah Bone selatan, maupun Kabupaten Bone secara keseluruhan hanya 3,5. Artinya masih di bawah batas ideal kelulusan (Laporan akhir Kajian Prospek Pemekaran Wilayah Kabupaten Bone Bagian Selatan oleh TIM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas, Makassar, 2007).

Tabel 4.1.3.2
Nilai dan Skor Sarana Pendidikan Menurut Kecamatan
di Wilayah Bone Bagian Selatan dan Kabupaten Bone

No	Kecamatan Bone Selatan	Rasio							
		SD per Pddk Usia SD		SLTP per Pddk Usia SLTP		SLTA per Pddk Usia SLTA		Usia PT per Pddk Usia 19+	
		Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
1	Bontocani	0,0066	3	0,0026	4	0,0000	1	0,134	2
2	Kahu	0,0100	4	0,0048	6	0,0017	5	0,129	2
3	Kajuara	0,0071	3	0,0012	2	0,0011	4	0,170	4
4	Salomekko	0,0058	2	0,0016	2	0,0000	1	0,209	6
5	Tonra	0,0091	4	0,0010	1	0,0013	5	0,165	4
6	Patimpeng	0,0040	1	0,0029	4	0,0000	1	0,158	4
7	Libureng	0,0080	4	0,0033	5	0,0017	5	0,109	1
Total Kec. Bone Selatan		0,0072	3	0,0026	4	0,0009	4	0,150	3
Total Kab. Bone		0,0075	3	0,0021	3	0,0009	4	0,153	4

Sumber Data : Hasil Olahan Data Sekunder TIM Unhas Makassar, 2007

4.1.4. Pekerjaan Responden

Selanjutnya, data distribusi responden berdasarkan jenis pekerjaan. Sesuai dengan teknik penentuan sampel yang penulis gunakan yaitu *purposive sampling* yang memilih secara sengaja dengan pertimbangan

bahwa responden/informan yang dipilih dianggap banyak mengetahui dan berkompoten terhadap masalah yang dihadapi, maka penulis telah menentukan dengan sengaja masyarakat yang terpilih menjadi responden berdasarkan jenis pekerjaan umum.

Tabel 4.1.4
Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

Jenis pekerjaan umum	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Tidak Bekerja	16	26.67
PNS/ TNI-Polri	14	23.33
Pedagang/ Wiraswasta	7	11.67
Petani/ Nelayan	12	20
Mahasiswa/Pelajar	1	1.67
Lainnya	10	16.66
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

4.2. Pandangan Tokoh Masyarakat Bone Bagian Selatan Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone

4.2.1. Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Pelaksanaan Pemerintahan

Masyarakat sebagai objek dari segala bentuk kebijakan pemerintah, tentunya memiliki berbagai macam tanggapan terhadap apa yang dinikmatinya sebagai buah dari hasil kinerja pemerintah, baik itu tanggapan yang bernada pro maupun kontra. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya tokoh masyarakat yang ada di Bone bagian selatan merasakan penyelenggaraan pemerintahan saat ini cukup memuaskan. Hal ini dibuktikan dengan data yang didapatkan di lapangan setelah melakukan penelitian. Dimana dari beberapa orang responden, 93,33% responden mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang ada sekarang ini dirasakan cukup memuaskan. Salah satunya disebabkan kurang ditemukannya unsur-unsur kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam proses penyelenggaraan pemerintah oleh masyarakat setempat (lihat tabel 4.2.1.1).

Tabel 4.2.1.1
Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Penyelenggaran Pemerintahan

Tingkat kepuasan responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat memuaskan	2	3,33
Memuaskan	54	90
Kurang memuaskan	4	6,67
Tidak memuaskan	-	-
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Sedangkan berdasarkan tabel 4.2.1.2, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya tokoh yang ada di Bone bagian selatan merasakan pelayanan pemerintah kecamatan yang ada sekarang ini dirasa cukup memuaskan. Hal ini terbukti dengan melihat dari sekian banyaknya responden, 85 % diantaranya yang mengatakan kepuasannya terhadap

pelayanan pemerintahan sekarang ini. Pada umumnya mereka sangat puas dikarenakan mudahnya mendapatkan pelayanan dari pemerintah setempat dan tidak pernah mendapatkan pelayanan yang berbelit-belit terutama yang berhubungan dengan masalah administrasi. Salah satu contohnya pelayanan dalam pengurusan pembuatan KTP dan lain-lain.

Dari tabel 4.2.1.2, menunjukkan bahwa dari 60 responden, 48 responden atau 80% menyatakan pelayanan pemerintah kecamatan yang ada sekarang ini dirasa cukup memuaskan, sedangkan yang mengatakan sangat memuaskan sebanyak 3 responden atau 5%. Selanjutnya tokoh yang merasa pelayanan pemerintah kecamatan kurang memuaskan sebanyak 6 orang atau 10%, sedangkan yang mengatakan tidak memuaskan sebanyak 3 responden atau 5%.

Tabel 4.2.1.2
Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Pelayanan
Pemerintah Kecamatan

Tingkat kepuasan responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat memuaskan	3	5
Memuaskan	48	80
Kurang memuaskan	6	10
Tidak memuaskan	3	5
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008



Meskipun di dalam Undang Undang ditegaskan bahwa urusan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat dan tidak didelegasikan ke daerah dalam kerangka otonomi daerah, namun upaya menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Indonesia, menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa dan negara termasuk daerah. Pemerintah daerah sebagai bagian integratif pemerintah nasional memiliki tanggung jawab turut serta mendukung pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayahnya masing-masing.

Dalam rangka penanganan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat, Pemerintah telah menyiapkan perangkat SDM (polisi dan tentara) di setiap kecamatan yang dilengkapi dengan sarana penunjang walaupun masih sangat sederhana dan jumlah yang terbatas. Upaya untuk lebih meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, di desa juga dibentuk Forum Bersama (FORBES) yang anggotanya terdiri dari polisi dan masyarakat. Ini adalah wujud kerja sama masyarakat dengan pemerintah dalam menciptakan keamanan yang dilakukan melalui Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING). Namun demikian jumlah Polisi dan Tentara yang tersedia disetiap kecamatan sangat terbatas, dibandingkan luas wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama, peran masyarakat dalam membantu pemerintah terus menerus dilakukan. Hal lain yang turut memberi kontribusi terhadap terkendalinya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Bone bagian selatan adalah

adanya kepatuhan masyarakat terhadap pemimpin lokalnya terutama kepada Kepala Desa.

Mengenai kondisi keamanan yang ada di Bone bagian selatan bisa dikatakan aman-aman saja. Hal ini terbukti dari hasil wawancara, di mana saudara Nur Hamzah sebagai salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

"Kondisi keamanan yang ada sekarang ini sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Sekarang, hampir di tiap desa yang ada di wilayah ini tidak pernah terdengar lagi adanya kejadian tindakan kriminal, terutama yang berhubungan dengan pencurian ternak" (Wawancara, November, 2008).

Tabel 4.2.1.3
Tanggapan Tokoh Masyarakat Tentang Kondisi Keamanan Selama Ini

Tingkat kepuasan responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat aman	3	5
Aman	50	83,33
Kurang aman	6	10
Tidak aman	1	1,67
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Dari tabel 4.2.1.3., menunjukkan bahwa dari 60 responden, 50 responden atau 83,33% menyatakan bahwa keamanan selama ini dirasa aman, sedangkan yang mengatakan sangat aman sebanyak 3 responden

atau 5%. Selanjutnya tokoh yang merasa wilayahnya kurang aman sebanyak 6 orang atau 10%, sedangkan yang mengatakan tidak aman sebanyak 3 responden atau 5%.

Sejalan dengan PP No 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan & Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, bahwa suatu daerah/Kabupaten yang akan dimekarkan, disamping dinilai faktor geografis, demografis, sosial budaya, sosial politik dan ekonomi, juga perlu mempertimbangkan faktor keamanan dan ketertiban agar esensi pemekaran yakni kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Secara umum kondisi keamanan di wilayah Bone bagian selatan memang cukup aman dan terkendali, meskipun harus diakui di wilayah ini sesekali terjadi kasus-kasus kejahatan berupa penganiayaan, pencurian dan perkelahian, namun gangguan keamanan dan ketertiban tersebut dianggap belum termasuk dalam kategori mengganggu keamanan secara luas. Hal ini dipertegas dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh TIM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Makassar, 2007.

4.2.2. Pengetahuan Tokoh Masyarakat tentang Istilah Pemekaran

Sejauh ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah mendapat dukungan besar dari tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat tidak hanya berpangku tangan menunggu rencana dari pemerintah tapi merekapun giat menyebarkan informasi ini ke sesama rekan kerja maupun tetangga.

Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian (lihat tabel 4.2.2), dimana berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mayoritas responden mengetahui istilah pemekaran setelah beberapa dari mereka mengikuti serangkaian sosialisasi berupa seminar yang dilakukan oleh pemerintah dan menyebarkan informasi yang didapatkan dari seminar tersebut ke kerabat ataupun ke temannya.

Dari tabel 4.2.2, yang berisi tentang darimana responden memperoleh informasi/ pengetahuan tentang istilah pemekaran wilayah, diperoleh hasil bahwa 16,67% atau 10 responden mendapatkan informasi tersebut dari keluarga, 23 orang (38,33%) memperoleh dari teman, 22 orang (36,67%) dari media baik itu media cetak maupun elektronik, sedangkan 5 orang (8,33%) memperoleh informasi tersebut dari sumber lain.

Tabel 4.2.2.

Sumber Pengetahuan Responden Terhadap Istilah Pemekaran

Sumber	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Keluarga	10	16,67
Teman	23	38,33
Media (cetak, elektronik)	22	36,67
Lain-lain	5	8,33
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

4.2.3. Pengetahuan Tokoh Masyarakat tentang Pemekaran Bone Selatan

Sejak dideklarasikan di lapangan Palattae, Kecamatan Kahu pada tanggal 26 Januari 2003 masyarakat Kabupaten Bone khususnya Bone Selatan telah terpecah menjadi dua kelompok yakni masyarakat yang pro maupun kontra terhadap wacana pemekaran tersebut. Konflik yang terjadi di Kabupaten Bone khususnya Bone bagian selatan yang memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Bone adalah sesuatu yang wajar terjadi terhadap sebuah isu pemekaran, oleh karena itu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis melalui metode wawancara dan data-data yang ada maka penulis akan menguraikan pendapat dari masing-masing kelompok yang berkonflik.

Salah satu yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengetahuan tokoh masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Bone Selatan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa pada umumnya tokoh masyarakat Bone bagian selatan mengetahui tentang adanya rencana pemekaran Bone bagian selatan. Ini terbukti dimana dari 60 responden sebanyak 100% yang mengetahui hal tersebut.

Menurut Andi Arham yang merupakan salah satu aktivis yang sejak dulu memperjuangkan masalah pemekaran wilayah di Bone, khususnya Bone Selatan mengatakan bahwa pemekaran wilayah bukan lagi merupakan isu

politik, tapi sudah merupakan tuntutan dan kebutuhan bagi masyarakat, ia menjelaskan bahwa :

"Rencana pemekaran ini sebenarnya sudah lama diimpikan oleh masyarakat Bone Selatan. Sewaktu acara pendeklarasian yang dilakukan langsung oleh masyarakat Bone Selatan yang dihadiri oleh sejumlah tokoh dan beberapa anggota dewan yang duduk di DPRD Sulsel. Bahkan tujuh orang anggota dewan dari Bone Selatan yang duduk di DPRD Bone waktu itu juga sangat menyetujui diadakannya pemekaran di Kabupaten Bone" (Wawancara, November, 2008).

Diuraikannya, bahwa hasil pendeklarasian Bone Selatan tersebut sudah disampaikan ke DPRD Pusat, terutama kepada Komisi II yang membidangi masalah pemekaran. Selain itu, hasil pendeklarasian tersebut juga sudah disampaikan ke Presiden, Departemen Dalam Negeri (Depdagri), dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Aspirasi masyarakat terhadap pemekaran wilayah Bone Selatan ini telah diperjuangkan melalui beberapa elemen masyarakat dan kelompok mahasiswa seperti; Komite Independen Masyarakat Peduli Bone (Koimapi Bone) yang dipimpin oleh Andi Mappaware Saleng, Aliansi Masyarakat Bone Selatan (AMBS) yang diketuai oleh Andi Akmal, Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Bone Selatan (KPPKBS), dan beberapa organisasi lainnya.

Pemerintah harus merespon positif aspirasi yang terjadi dikarenakan wacana pembentukan Kabupaten Bone Selatan betul-betul merupakan aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Idrus sebagai

salah seorang tokoh yang mengetahui tentang wacana pemekaran Kabupaten Bone Selatan, mengatakan bahwa:

"Upaya pemekaran wilayah yang sudah berjalan ini harus menjadi perhatian serius dari segenap elemen masyarakat, para anggota dewan yang duduk di DPRD Bone serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bone di bawah kepemimpinan Bupati H. A. Muh Idris Galigo, SH., MH., agar memberikan respon positif terhadap aspirasi masyarakat Bone Selatan" (Wawancara, November, 2008).

Pembentukan Bone Selatan merupakan aspirasi yang murni dari masyarakat dan bukan merupakan kepentingan orang tertentu seperti yang dikemukakan oleh Andi Abd. Latief sebagai salah seorang tokoh masyarakat Bone Selatan yang diwawancarai penulis di rumahnya sebagai berikut :

"Keinginan memekarkan wilayah memang sudah dari dulu kita inginkan melihat potensi yang ada sudah memenuhi syarat untuk dimekarkan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa wacana ini merupakan kepentingan orang tertentu itu tidaklah betul sebab kondisi masyarakat di bawah yang ada di Bone Selatan betul-betul menginginkan sebuah pemekaran wilayah" (Wawancara, November, 2008).

Di lain tempat pula salah seorang tokoh agama yang ada di Bone Selatan yang ikut diwawancarai oleh penulis soal rencana pembentukan Kabupaten Bone Selatan menyatakan bahwa:

"Keinginan untuk melakukan perubahan itu tidaklah dilarang oleh agama selama itu baik dan untuk kepentingan umat, Insya Allah saya yakin tuhan pasti akan ridho atas upaya ini selama niat kita tetap untuk kepentingan masyarakat itu sendiri" (Wawancara, November, 2008).

Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 kecamatan dengan lebih 700 desa/kelurahan sangat besar untuk dikelola oleh satu pemerintahan saja. Secara ideal Kabupaten Bone sebaiknya dimekarkan menjadi satu Kota dan 3 Kabupaten, motivasi untuk melakukan pemekaran adalah persoalan politik. Misalnya dalam hal kepemimpinan, dengan dilakukannya pemekaran wilayah maka setiap putera-putera daerah yang ada di wilayah ini mempunyai kesempatan yang relatif lebih luas, hal ini senada dengan tokoh pemuda yang ditemui oleh penulis yang ada di Bone Selatan yang juga ikut mendukung adanya sebuah pemekaran atau pembentukan wilayah baru disebabkan dengan adanya pemekaran maka potensi-potensi yang dimiliki oleh kaum muda daerah Bone Selatan dapat tersalurkan seperti yang dinyatakan oleh Andi Zulfikar selaku tokoh pemuda di Bone Selatan sebagai berikut:

"Jika Kabupaten Bone Selatan terbentuk maka sumber daya manusia dari kalangan muda Bone Selatan dapat tersalurkan untuk ikut membangun, disebabkan begitu banyaknya lulusan pendidikan dari berbagai jenjang perguruan tinggi dengan disiplin ilmu yang berbeda yang berasal dari Bone Selatan" (Wawancara, November, 2008).

Keinginan masyarakat yang tergabung dalam kelompok kepentingan yang pro terhadap pembentukan Kabupaten Bone Selatan sebagai sebuah konsep yang beralasan bahwa pemekaran adalah keinginan yang sudah sejak lama diidamkan oleh masyarakat di daerah konflik melihat adanya ketimpangan-ketimpangan pelayanan pemerintah di bidang-bidang tertentu

sehingga menciptakan kesenjangan dan kecemburuan sosial dan membuat masyarakat bahwa pembentukan kabupaten baru adalah kebutuhan yang sangat mendesak dan tak dapat ditawar-tawar lagi.

Dalam kesempatan yang lain, ada juga tokoh masyarakat di setiap kecamatan mengemukakan ketidaksetujuannya dilakukan pemekaran karena melihat sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum dikelola maksimal dan tidak selayaknya dimekarkan karena persoalan budaya, melihat ketakutan masyarakat apabila daerah tersebut dimekarkan maka akan terjadi pemisahan kultur budaya. Disini dapat terlihat bahwa adanya ketidaksetujuan sebagian tokoh di Kabupaten Bone, khususnya Bone bagian selatan apabila nantinya pemekaran itu terjadi. Mereka takut akan terjadi perpecahan pada masyarakat Bone karena mereka menganggap bahwa budaya mereka akan menjadi terpecah-pecah dan tidak akan menjadi satu kesatuan lagi.

4.3. Harapan Tokoh Masyarakat Akan Terbentuknya Bone Selatan

4.3.1. Pengamatan Tokoh Masyarakat Akan Terbentuknya Bone Selatan

Dari beberapa komponen yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, maka komponen terpenting adalah menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Oleh karena itu lebih lanjut melihat



tanggapan tokoh masyarakat tentang akan pelayanan yang ada setelah Bone Selatan terbentuk dapat dilihat pada tabel 4.3.1.1.

Tabel 4.3.1.1
Tanggapan Responden Akan Pelayanan Jika Bone Selatan Terbentuk

Tanggapan responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat lebih baik	7	11,67
Lebih baik	41	68,34
Kurang baik	10	16,66
Tidak baik	2	3,33
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Dari tabel 4.3.1.1, menunjukkan bahwa dari 60 responden, 41 responden atau 68,34% menyatakan bahwa apabila Bone Selatan terbentuk pelayanan pemerintah akan menjadi lebih baik, sedangkan yang mengatakan sangat lebih baik sebanyak 7 responden atau 11,67%. Selanjutnya tokoh yang mengatakan pelayanan akan menjadi kurang baik sebanyak 10 orang atau 16,66%, sedangkan yang mengatakan tidak baik sebanyak 2 responden atau 3,33%.

Pandangan yang banyak tentang akan membaiknya pelayanan pemerintah tersebut di atas dimungkinkan dengan jarak tempuh yang lebih dekat lagi ke kantor-kantor pemerintahan serta fasilitas publik lainnya setelah kabupaten Bone selatan terbentuk nantinya. Hal tersebut akan memudahkan pengurusan berbagai hal-hal administratif yang dibutuhkan warga.

Tabel 4.3.1.2
Tanggapan Responden Akan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Jika
Bone Selatan Terbentuk

Tingkat kesejahteraan masyarakat	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Lebih sejahtera	11	18,34
Sejahtera	38	63,33
Kurang sejahtera	10	16,66
Tidak sejahtera	1	1,67
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Dari tabel 4.3.1.2, menunjukkan bahwa dari 60 responden, 11 responden atau 18,34% menyatakan bahwa apabila Bone Selatan terbentuk, maka masyarakat akan lebih sejahtera, sedangkan yang mengatakan masyarakat akan sejahtera sebanyak 38 responden atau 63,33%. Selanjutnya tokoh yang mengatakan kehidupan masyarakat nantinya akan kurang sejahtera sebanyak 10 orang atau 16,66%, sedangkan yang mengatakan kehidupan masyarakat tidak sejahtera sebanyak 1 responden atau 1,67%.

Pandangan yang banyak tentang akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dimungkinkan akan banyaknya sektor-sektor perekonomian yang dibutuhkan daerah di kabupaten yang baru. Sejalan dengan itu, tingkat

pendapatan masyarakat juga tentunya akan meningkat karena didorong oleh terbukanya lapangan kerja baru pada sektor ekonomi dan pemerintahan (lihat tabel 4.3.1.3). Sekarang ini terdapat banyak pengangguran yang rata-rata dari mereka pernah mengenyam pendidikan tinggi yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda. Banyak dari mereka mengharapkan terbentuknya Kabupaten Bone Selatan dengan pertimbangan akan mendapatkan pekerjaan sesuai disiplin Ilmu mereka.

Tabel 4.3.1.3
Tanggapan Responden Akan Tingkat Pendapatan Masyarakat
Jika Bone Selatan Terbentuk

Tingkat pendapatan masyarakat	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Lebih meningkat	7	11.67
Meningkat	42	70
Kurang meningkat	9	15
Tidak meningkat	2	3.33
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Daerah Bone bagian selatan memiliki beberapa potensi ekonomi, misalnya kandungan bijih besi di Bontocani, kandungan emas di Patimpeng, dan potensi pertanian (khususnya beras) di Kahu. Pengelolaan potensi-potensi ini sangat terbatas. Potensi tambang tersebut telah bertahun-tahun

diketahui oleh masyarakat luas (bahkan tercantum dalam data statistik Bone Dalam Angka dari tahun ke tahun), namun hingga kini belum ada satupun yang dieksploitasi. Potensi pertanian juga tidak mengalami kemajuan yang berarti, disebabkan tidak tersedianya dukungan infrastruktur yang memadai, manajemen paska panen, pasar, dan sebagainya.

Masyarakat di wilayah Bone bagian selatan sangat menyayangkan hilangnya peluang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tersedia di pelabuhan laut yan terletak di Kecamatan Kajuara. Terdapat persepsi umum di masyarakat Kecamatan Kahu bahwa karena pelabuhan tersebut lebih banyak digunakan oleh penduduk Sinjai, maka potensi pendapatan asli daerah melalui retribusi lebih banyak diserap oleh pemerintah Kabupaten Sinjai. Sementara Kabupaten Bone yang secara administratif memiliki kewenangan terhadap pelabuhan tersebut hanya memperoleh manfaat yang relatif kecil.

Potensi-potensi yang ada di daerah Bone bagian selatan yang prospeknya bagus untuk dikembangkan menurut para informan adalah potensi pelabuhan, rumput laut dan tambak, disamping tanah-tanah kosong yang luas perlu ditanami tanaman-tanaman yang baik. Dari hasil wawancara terungkap bahwa sebenarnya pelabuhan yang ada di Bone bagian selatan pemasukannya lebih banyak daripada pelabuhan Bajoe, setiap hari banyak kapal berlabuh kurang lebih 200 kapal dengan berat 40 ton s/d 400 ton. Sedangkan rumput laut prospeknya juga sangat bagus karena menurut orang

bahwa hasil rumput laut di daerah ini yang terbaik kualitasnya di seluruh Indonesia. Kendalanya adalah bahwa pada musim hujan pertumbuhan rumput laut tidak baik, inilah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Masalah tambak juga bagus karena menurut beberapa informan sangat bagus kualitas ikannya, dan tanah-tanah yang kosong sangat bagus digunakan untuk ditanami jagung apalagi cukup luasnya tanah di Bone bagian selatan. Sebagai perbandingan menurut mereka masa kita tidak bisa melakukannya, sedangkan Kabupaten Jeneponto saja yang luas tanahnya tidak seberapa bisa berkembang kenapa kita tidak. Berbagai potensi inilah yang bagus dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat apabila Bone bagian selatan dimekarkan menjadi kabupaten. Oleh karena itu menurut para informan untuk mengelola dengan baik potensi-potensi tersebut pemerintah harus memperhatikannya utamanya dalam hal bantuan modal, pemasaran dan pelatihan-pelatihan bagi petani berkaitan dengan cara pengelolaan yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, bahwa dimana para tokoh masyarakat Bone bagian selatan pada umumnya mengetahui banyaknya potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam menunjang proses pemekaran wilayah Kab. Bone Selatan. Adapun potensi tersebut antara lain:

1. Potensi daerah pada sektor pertanian yang terdapat di kecamatan Bontocani yang terkenal dengan daerah lumbung padi.

2. Perikanan yang terdapat di kecamatan Tonra.
3. Peternakan yang terdapat di kecamatan Kahu dan Patimpeng.
4. Objek wisata (pasir putih atau pantai tete) yang terdapat di kecamatan Tonra.
5. Rumput laut di kecamatan Kajuara.
6. Pelabuhan di kecamatan Salomekko.
7. Tambang marmer di kecamatan Salomekko.
8. Biji Besi yang terdapat di Kecamatan Bontocani.
9. Tambang emas (bulu ulaweng atau bulu kamiseng) di kecamatan Patimpeng.

Tabel 4.3.1.4
Tanggapan Tokoh Masyarakat tentang
Potensi Daerah Yang Dapat Dikembangkan

Tingkat pengetahuan masyarakat	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat banyak	6	10
Banyak	41	68,34
Kurang banyak	7	11,66
Tidak banyak	6	10
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Kabupaten Bone yang terdiri atas 27 kecamatan mayoritas penduduknya kental dengan adat istiadat serta tradisi yang menjunjung tinggi

nilai-nilai budaya yang saling menghormati satu sama lain agar hubungan sosial dapat terjalin dengan harmonis. Keutuhan adat istiadat senantiasa dipertahankan oleh masyarakat utamanya tokoh masyarakat dari generasi tua. Hal yang sukar untuk disangkal bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akan tetapi juga berbagai faktor, antara lain faktor sosial budaya masyarakat. Berbagai kalangan dalam mengamati kondisi sosial budaya sering menggunakan dan/atau mengaitkannya dengan beberapa indikator seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, organisasi sosial dan lingkungan dsb. Namun demikian dalam konteks ini, indikator yang digunakan mengacu pada PP 129 Tahun 2000.

Tabel 4.3.1.5
Tanggapan Responden Akan Kultur Budaya Yang Ada

Tingkat tanggapan masyarakat	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat berubah	3	5
Berubah	20	33,33
Kurang berubah	14	23,33
Tidak berubah	23	38,34
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Dari tabel 4.3.1.5., menunjukkan bahwa dari 60 responden, 3 responden atau 5% menyatakan bahwa apabila Bone Selatan terbentuk maka budaya yang ada akan sangat berubah, sedangkan yang mengatakan kultur budaya akan berubah sebanyak 20 responden atau 33,33%. Selanjutnya tokoh yang mengatakan kultur budaya kurang berubah setelah Bone Selatan dimekarkan sebanyak 14 orang atau 23,33%, sedangkan yang mengatakan kultur budaya tidak berubah sebanyak 23 responden atau 38,34%. banyaknya

Pandangan akan terjadinya perubahan kultur budaya dimungkinkan oleh berbagai persentuhan dengan budaya luar oleh kunjungan dari luar dan masuknya warga dari daerah lain untuk berusaha di kabupaten baru tersebut.

4.3.2. Alasan Tokoh Masyarakat Akan Rencana Pemekaran Bone Selatan

Pada umumnya, alasan pengusulan pembentukan daerah otonom baru adalah sebagai solusi atas ketertinggalan pembangunan suatu wilayah karena rentang kendali pemerintahan daerah sangat luas dan kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan publik. Namun demikian, dalam pelaksanaan proses pembentukan daerah otonom baru lebih banyak mempertimbangkan aspek politis, kemauan sebagian kecil elit daerah, dan belum atau kurang mempertimbangkan aspek-aspek lain selain yang disyaratkan melalui Peraturan Pemerintah yang ada.

Dampak dari terbentuknya daerah otonom baru antara lain setiap tahunnya akan membebani anggaran negara karena meningkatnya belanja daerah untuk keperluan penyusunan kelembagaan dan anggaran rutinnya sehingga pembangunan di daerah otonom lama (induk) dan baru tidak mengalami percepatan pembangunan yang berarti. Pelayanan publik yang diharapkan meningkat setelah adanya pembentukan daerah otonom baru (pemekaran wilayah), kurang dirasakan oleh masyarakatnya, bahkan di beberapa daerah kondisinya tetap seperti semula. Selain itu, hasil evaluasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa secara umum penerapan dan pelaksanaan kebijakan pembentukan daerah otonom baru (pemekaran daerah) belum sesuai dengan tujuan utama pembentukannya. Kelemahan ini antara lain terlihat pada: (1) upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat; (2) percepatan pertumbuhan demokrasi; (3) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah; (4) percepatan pengelolaan potensi daerah; dan (5) kondisi keamanan dan ketertiban.

Kendati demikian, untuk memberikan penilaian plus/minus terhadap tuntutan pemekaran wilayah dengan segala kepentingan yang menyertainya, tentu tidaklah *fair* apabila yang lebih banyak ditonjolkan semata kelemahannya tanpa mengetengahkan hal-hal positif yang telah dicapai. Terdapat sejumlah daerah baik kabupaten induk maupun kabupaten pemekaran setelah dimekarkan menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Pada level Kabupaten/Kota, di Sulawesi Selatan dapat dilihat dari kemajuan/

perkembangan yang telah dicapai oleh Kota Palopo, Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Luwu Utara. Demikian pula pada level Provinsi seperti kemajuan/perkembangan yang begitu pesat pada Provinsi Gorontalo setelah dimekarkan dari provinsi induknya Sulawesi Utara.

Tabel 4.3.2
Tanggapan Responden Akan Terbentuknya Bone Selatan

Tingkat persetujuan responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Sangat Setuju	14	23,33
Setuju	34	56,66
Kurang setuju	7	11,66
Tidak setuju	5	8,33
Jumlah	60	100

Sumber Data : Hasil Olahan Kuisisioner, November 2008

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, baik yang dilakukan secara penyebaran kuesioner maupun wawancara secara langsung terhadap informan, penulis dapat menyatakan bahwa keinginan masyarakat untuk memekarkan diri ternyata sangat besar, ini terbukti dengan rasio yang dapat dilihat pada tabel 4.3.2. Dari penelitian pula, penulis memperoleh sejumlah informasi tentang alasan yang melatarbelakangi keinginan tersebut, yaitu:

1. **Jarak tempuh yang sangat jauh.** Seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, bahwa secara geografis ke-7 (ketujuh) kecamatan yang menjadi anggota wilayah perencanaan Kabupaten Bone Selatan

letaknya sangat jauh dari Watampone (ibukota kabupaten Bone) dan dengan jarak tempuh yang berkisar antara 52 Km (Kecamatan Tonra) sampai 112 Km (Kecamatan Bontocani). Selain itu, waktu, biaya dan tenaga pun terkuras habis, sehingga pelaksanaan urusan yang berhubungan dengan pemerintah daerah menjadi sangat sulit. Hal ini utamanya banyak dialami oleh para Pegawai Negeri Sipil. Dengan kondisi yang seperti ini, implementasi otonomi daerah sangat susah dilaksanakan. Asas desentralisasi yang bertujuan untuk mengembalikan kewenangan sepenuhnya kepada masyarakat daerah menjadi sulit tercipta, karena jarak antara pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pelayan masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan sentuhan kebijakan dari pemerintahnya sangat jauh. Sehingga, dengan adanya rencana pemekaran ini, masyarakat sangat berharap hal itu tidak perlu mereka alami, pelayanan pemerintah pun akan semakin cepat, mudah/murah dan berkualitas.

2. **Terbukanya lapangan pekerjaan yang baru.** Tanggapan ini didominasi oleh pemuda yang tidak mempunyai pekerjaan yang ada di wilayah Bone bagian selatan. Mereka berpendapat bahwa jika Kabupaten Bone Selatan terbentuk berbagai lapangan pekerjaan akan terbuka, baik instansi pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta yang hadir untuk membuka cabang di wilayah ini. Berbagai jenis profesi tentunya akan diisi oleh masyarakat setempat, terutama bagi

mereka yang berusia produktif seperti pemuda. Berbagai jenis lapangan pekerjaan yang baru akan terbuka seiring dengan hadirnya kebutuhan dan jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh sebuah daerah baru seperti pelayanan perbankan dan sektor usaha swasta lainnya.

3. **Keinginan untuk melihat daerahnya maju.** Tanggapan ini didominasi oleh para guru dan pemuda yang ada di wilayah Bone selatan. Mereka berpendapat bahwa jika suatu daerah telah meningkat derajatnya secara administratif, maka pembangunanpun juga akan terlihat di daerah itu. Besarnya Dana Alokasi Umum bagi daerah tiap tahunnya tidak dapat menghasilkan sebuah pembangunan yang baik dan merata, karena luasnya daerah yang harus dibiayai dan banyaknya alokasi dana yang harus dikeluarkan mengakibatkan proses pembangunan daerah tidak maksimal. Dengan adanya pemekaran, secara langsung akan menguntungkan bagi kedua daerah, baik daerah induk maupun daerah yang baru dibentuk, karena alokasi dana yang akan berkurang sehingga porsi untuk setiap item juga akan semakin besar.
4. **Potensi daerah akan mulai tersentuh oleh pemerintah.** Kemajuan suatu daerah bukan berarti daerah tersebut memiliki banyak potensi, demikian pula sebaliknya, stagnasi pembangunan yang dialami suatu daerah tidak dapat serta merta diklaim bahwa penyebabnya adalah karena kurangnya atau bahkan tidak adanya sumber daya alam yang

dapat dikelola di daerah tersebut. Bisa saja hal ini lebih disebabkan oleh karena tidak terjangkaunya potensi tersebut oleh pemerintah, tentu saja karena faktor jarak/rentan kendali antara pemerintah dengan daerahnya. Sehingga, dengan hadirnya pemerintah di dekat masyarakat, eksplorasi potensi baik potensi alam maupun potensi manusia akan dapat dilakukan.

4.4. Beberapa Peluang Konflik Terhadap Rencana Pembentukan Kabupaten Bone Selatan

Dewasa ini keinginan untuk melakukan perubahan sistem yang telah ada menjadi sebuah sistem yang baru dengan harapan akan mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya seakan-akan telah menjadi sebuah kebutuhan yang harus terpenuhi. Adanya Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah seakan-akan memberikan angin segar bagi daerah dan golongan masyarakat tertentu di daerah untuk memanfaatkan peraturan pemerintah tersebut dengan alasan yang sudah sering kita dapati yaitu untuk membangun daerah dengan potensi-potensi daerah yang ada melalui sebuah pemekaran wilayah.

Indonesia yang memiliki tingkat pluralitas yang tinggi serta sistem demokrasi yang memberikan kebebasan yang besar kepada masyarakat sehingga kondisi ini kemudian dapat menjadi sangat rentan terhadap timbulnya konflik dalam skala kecil maupun besar adanya otonomi daerah

yang secara normatif telah memberikan keleluasaan bagi masyarakat di daerah untuk mengaktualisasikan diri secara optimal dalam manajemen pembangunan daerah.

Undang-undang yang mendasari praktik otonomi daerah memberi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat dan kebudayaannya, otonomi daerah yang menandai era penghargaan terhadap keberagaman dan otonomi masyarakat, setelah orde baru memberangusnya selama masa tiga dasawarsa lebih. Dalam ruang politik yang semakin terbuka dewasa ini masyarakat di daerah menggali kembali potensi kelembagaan sosial atau konstruk nilai-nilai budaya lokal yang dianggap berguna untuk menopang eksistensi mereka di tengah arus globalisasi dan dinamika pembangunan daerah.

Pemekaran wilayah sebagai sebuah aspirasi yang muncul di dalam masyarakat adalah sebuah konflik yang ternyata bukan hanya memberikan peluang dan harapan, munculnya potensi-potensi konflik yang bila tidak ditangani dengan baik dan secara bijaksana maka akan dapat membawa suatu daerah yang sedang berkonflik menjadi sebuah keadaan yang dapat mengancam sistem dan sendi-sendi kehidupan di daerah konflik.

Potensi konflik yang muncul kemudian di daerah yang sedang diteliti oleh penulis yakni Bone Selatan adalah konflik antara kelompok-kelompok masyarakat yang masih berada pada posisi pertarungan mempertahankan kepentingan yang telah ada dan yang telah dimiliki oleh golongan masyarakat

atau elit tertentu dalam arti adanya kelompok yang tidak menyetujui adanya sebuah pemekaran di daerah konflik disebabkan alas-alasan yang menurut mereka beralasan dan sangat benar yakni suatu pemekaran wilayah adalah sebuah usaha yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dikarenakan isu pemekaran oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang hanya mempunyai kepentingan-kepentingan tersendiri dan bukan merupakan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Di samping alasan yang tidak mungkin diungkapkan yaitu keinginan mempertahankan kekuasaan yang telah dimiliki dan tidak ingin membaginya kepada orang lain.

Di lain pihak pula pemekaran wilayah yang diinginkan oleh kelompok yang mendukung adalah sebuah tujuan yang harus dicapai dengan harapan yang diyakini oleh mereka akan membawa dampak yang positif bagi masyarakat di daerah konflik dikarenakan optimalisasi pelayanan pemerintah yang akan mencapai secara keseluruhan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat di daerah konflik selain itu pula kemungkinan adanya keinginan mendapatkan kekuasaan atau jabatan dalam daerah yang akan dimekarkan yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di daerah penelitian maka potensi konflik yang muncul ialah perebutan atau pembagian kekuasaan nantinya pada wilayah yang akan terbentuk seperti yang diutarakan oleh Wakil Ketua Dewan A. Muskamal Bare seperti di bawah ini:

"Kemungkinan besar potensi konflik yang akan terjadi nantinya ialah perebutan atau pembagian kekuasaan atau jabatan jika betul-betul Bone Selatan dapat terealisasikan" (Wawancara November, 2008).

Ditambahkan juga bahwa potensi konflik nantinya adalah penempatan ibukota seperti yang diutarakan oleh Andi Musyirah Amal S.STP selaku tokoh masyarakat di Bone Selatan seperti di bawah ini:

"Kelak jika bone selatan telah menjadi kabupaten maka potensi konflik yang akan muncul dan paling besar menurut saya adalah penempatan ibukota nantinya dikarenakan setiap kecamatan merasa berhak dan mampu untuk dijadikan sebagai ibukota kabupaten" (Wawancara November, 2008).

Disamping itu pula potensi konflik yang terjadi kemudian adalah perbedaan pendapat antara golongan masyarakat di daerah konflik yang masing-masing kelompok mempunyai elit-elit lokal yang bermain terhadap wacana konflik yang terjadi dengan masing-masing tujuan yang sarat dengan berbagai kepentingan yang didukung oleh massa dari masing-masing kelompok.

Sebaliknya pula dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana pembentukan Bone Selatan haruslah ditangani secara profesional dan arif bijaksana disebabkan konflik yang terjadi dapat menjadi boomerang bagi yang berkonflik atau malah menjadi sesuatu yang amat bermanfaat bagi kelompok yang berkepentingan.

BAB V

PENUTUP

Pada bab iv telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan dan harapan tokoh masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Bone (Bone bagian selatan), tanggapan tokoh masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan, alasan tokoh masyarakat akan rencana pemekaran Bone selatan, serta beberapa peluang konflik sehubungan dengan rencana pembentukan Kabupaten Bone Selatan. Dalam bab ini, akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis dengan judul pandangan dan harapan tokoh masyarakat terhadap wacana pemekaran Kabupaten Bone (Bone bagian selatan), ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan, yaitu:

1. Berdasarkan hasil pembahasan tergambar bahwa tokoh yang mendukung pemekaran Bone Selatan adalah mereka yang terindikasi sebagai aktivis partai politik, organisasi pemuda daerah, cendekiawan, politisi yang pada dasarnya mengerti akan pemekaran tersebut, baik dilihat dari kepentingan atau memang justru Bone selatan sudah layak untuk dimekarkan melihat ketentuan dari PP No. 78 Tahun 2007

khususnya yang menyangkut pelayanan masyarakat dan potensi daerah serta luas wilayah.

2. Pada kelompok lain dari hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa tokoh ini tidak punya kepentingan mendasar, tidak dikatakan anti pemekaran dan tidak juga setuju pemekaran. Tokoh masyarakat ini terlihat pada pendidik, kepala desa, agamawan, dan budayawan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan beberapa saran sebagai berikut.

1. Berdasarkan apa yang diinginkan masyarakat, bahwa ada tim yang telah melakukan kajian terhadap rencana pemekaran Bone selatan, termasuk tim dari Unhas, agar kiranya Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD sedapat mungkin menyampaikan hasilnya pada tingkat masyarakat yang bersangkutan sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami dan mengerti permasalahan sesungguhnya sehubungan dengan rencana pemekaran Bone selatan.
2. Pemerintah Kabupaten Bone dan DPRD harus bersikap tegas terhadap rencana pemekaran Bone selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam., 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Faizal, Sanafiah., 2001, *Format-Format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Kusnadi, Usman, M.Pd.Dr., 1996, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1981, *Pengantar Antropologi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mansyur M. ChioliJ, 1989. *Sosiologi Masyarakat Desa dan Kota*, _ : _
- Moleong, Lexi J., 1997, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rasyid, M. Ryass., 1997, *Makna Pemerintahan*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.
- Soekanto, Sardjono., 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Grasindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, DR., 2004, *Statistika Untuk Penelitian*, CV Alfabeta, Bandung.
- Thoha, Miftah., 1993, *Perilaku Organisasi, Konsep Dasar Dan Aplikasinya*, PT. Rajawali Press, Jakarta.
- Wijaya, Indra, Adam., 1986, *Perilaku Organisasi*, Sinar Baru, Jakarta.

Dokumen-Dokumen

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

Laporan Akhir "Kajian Prospek Pemekaran Wilayah Kabupaten Bone Bagian Selatan" oleh Tim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unhas Makassar Tahun 2007.

Kabupaten Bone Dalam Angka 2008.

www.bone.go.id

www.tribun-timur.com

LAMPIRAN



LAMPIRAN I

TIM PENELITI
INDEPENDEN MAHASISWA FISIP UNHAS

KUESIONER

Dalam kuesioner ini mencoba memperoleh data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan suatu penelitian skripsi yang berjudul "**Pandangan dan Harapan Tokoh Masyarakat Terhadap Wacana Pemekaran Kabupaten Bone (Bone Bagian Selatan)**". Untuk itu diharapkan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk membantu mengisi kuesioner ini dengan benar dan tepat guna memperoleh data sebagaimana yang diharapkan dan dapat menyempurnakan skripsi yang sedang diteliti ini.

I. Identitas Responden

1. Berapa usia /umur Bapak/ibu/saudara (i) sekarang?
2. Jenis kelamin : 1. Laki-laki [] 2. Perempuan []
3. Suku :
4. Di mana alamat Bapak/ibu/saudara (i) sekarang?
 - a. Desa/Kelurahan :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
5. Apa pendidikan terakhir Bapak/ibu/saudara (i) sekarang?
 - a. Tidak pernah sekolah []
 - b. SD/ Sederajat Tamat [] Tidak []
 - c. SLTP/ Sederajat Tamat [] Tidak []
 - d. SMU/ Sederajat Tamat [] Tidak []
 - e. Diploma Tamat [] Tidak []
 - f. S1 Tamat [] Tidak []
 - g. S2 Tamat [] Tidak []
 - h. S3 Tamat [] Tidak []
6. Pekerjaan :
 - a. Tidak bekerja.

- b. PNS/ TNI – Polri .
- c. Pedagang/ Wiraswasta.
- d. Petani/ Nelayan.
- e. Pelajar/ Mahasiswa.
- f. Lainnya (sebutkan).

II. Pandangan dan Harapan

7. Bagaimana menurut Bapak/ibu/saudara (i) tentang pelayanan pemerintah yang ada di kecamatan ini?
- a. Sangat memuaskan.
 - b. Memuaskan.
 - c. Kurang Memuaskan.
 - d. Tidak memuaskan.
8. Jika jawaban anda sangat memuaskan/ tidak memuaskan, kemukakan alasannya?
-
-
-
9. Menurut Bapak/ibu/saudara (i), bagaimanakah tempat pelayanan selama ini?
- a. Sangat memadai.
 - b. Memadai.
 - c. Kurang memadai.
 - d. Tidak memadai.
10. Jika jawaban anda sangat memadai/ tidak memadai, kemukakan alasannya?
-
-
-
11. Menurut Bapak/ibu/saudara (i), bagaimanakah penyelenggaraan pemerintahan selama ini?
- a. Sangat baik.

- b. Baik.
- c. Kurang baik.
- d. Tidak baik.

12. Menurut Bapak/ibu/saudara (i), adakah kekurangan penyelenggaraan pemerintahan saat ini?

- a. Ada.
- b. Tidak ada.

13. Jika tidak ada, apa alasan anda?

.....

.....

.....

14. Apakah kondisi keamanan di wilayah Bapak/ibu/saudara (i) dalam keadaan?

- a. Sangat aman.
- b. Aman.
- c. Kurang aman.
- d. Tidak aman.

15. Pernahkah Bapak/ibu/saudara (i) mendengar istilah pemekaran wilayah?

- a. Pernah.
- b. Tidak pernah.

16. Jika pernah, dimana Bapak/ibu/saudara (i) mendengar istilah tersebut?

- a. Keluarga.
- b. Teman.
- c. Media (cetak, elektronik).
- d. Lain-lain.

17. Beberapa waktu yang lalu terdengar wacana bahwa Bone bagian selatan akan dimekarkan. Bagaimana pendapat Bapak/ibu/saudara (i)?

- a. Sangat setuju.
- b. Setuju.
- c. Kurang setuju.
- d. Tidak setuju.

18. Jika Bapak/ibu/saudara (i) setuju/ tidak setuju, apa alasannya?
-
-
19. Menurut Bapak/ibu/saudara (i), akan bagaimanakah proses pelayanan yang ada jika Bone bagian selatan dimekarkan nantinya?
- Sangat lebih baik.
 - Lebih baik.
 - Kurang baik.
 - Tidak baik.
20. Bagaimanakah tanggapan Bapak/ibu/saudara (i) melihat respon dari pemerintah kecamatan terhadap pemekaran Bone bagian selatan?
- Sangat setuju.
 - Setuju.
 - Kurang setuju.
 - Tidak setuju.
21. Menurut Bapak/ibu/saudara (i) jika Bone bagian selatan dimekarkan, akan bagaimanakah pelaksanaan pemerintahan nantinya?
- Sangat baik.
 - Baik.
 - Kurang baik.
 - Tidak baik.
22. Menurut Bapak/ibu/saudara (i) jika Bone bagian selatan dimekarkan, akan bagaimanakah kehidupan masyarakat nantinya?
- Lebih sejahtera.
 - Sejahtera.
 - Kurang sejahtera.
 - Tidak sejahtera.
23. Jika Bone bagian selatan dimekarkan, akan bagaimanakah tingkat pendapatan masyarakat nantinya?
- Lebih meningkat.
 - Meningkat.

- c. Kurang meningkat.
 - d. Tidak meningkat
24. Apakah ada potensi daerah yang dapat dikembangkan dalam menunjang pemekaran Bone bagian selatan?
- a. Sangat banyak.
 - b. Banyak.
 - c. Kurang banyak.
 - d. Tidak banyak.
25. Jika ada, dapatkan Bapak/ibu/saudara (i) menyebutkan potensi daerah tersebut?
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
26. Menurut Bapak/ibu/saudara (i) jika Bone bagian selatan dimekarkan, akan bagaimanakah kultur budaya yang ada?
- a. Sangat berubah.
 - b. Berubah.
 - c. Kurang berubah.
 - d. Tidak berubah.
27. Menurut Bapak/ibu/saudara (i) adakah peluang akan terbentuknya Kab. Bone Selatan?
- a. Ada.
 - b. Tidak ada.
28. Menurut Bapak/ibu/saudara (i) apakah ada tendensi politik akan pemekaran Bone bagian selatan?
- a. Ada.
 - b. Tidak ada.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin!!!!!!